

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peneliti telah sampai pada akhir kerja penelitian ini. Pada bab ini, peneliti akan menyimpulkan keseluruhan dari hasil dan temuan baik di level teks, konteks, maupun penggabungan keduanya. Kesimpulan ini tak akan jauh berbeda dengan apa yang peneliti jabarkan di bagian penggabungan analisis teks dan konteks. Meski begitu, tetap ada beberapa tambahan untuk lebih memperjelas hasil penelitian ini. Berikut kesimpulan yang telah disusun oleh peneliti berdasar dari seluruh proses dan tahapan dalam penelitian ini:

1. Menurut Jawa Pos, kinerja Pansus Century buruk, nihil, bahkan negatif. Pansus Century dinilai hanya berisi orang-orang yang punya kepentingan politik tertentu dan secara personal tidak suka dengan Sri Mulyani. Pembentukan Pansus Century juga hanya akan menimbulkan trauma politik bagi pejabat yang seharusnya pro-aktif jika ada potensi krisis ekonomi. Proses kerja Pansus Century pun tak maksimal dengan adanya konflik internal Pansus, ditambah proses pemeriksaan yang tidak mendalam. Penilaian di atas berkaitan pula dengan keberpihakan Jawa Pos terhadap kebijakan *bailout* dan pemahaman bahwa kasus ini muncul karena masalah internal Bank Century, kesalahan kelola pemiliknnya, dan krisis ekonomi global yang juga menerpa Indonesia. Maka, tiga frame besar Jawa Pos tersebut saling terkait satu dengan lainnya.

2. Rutinitas internal Jawa Pos sebagai institusi media massa, ternyata sangat berpengaruh pada produk beritanya, termasuk Jati Diri. Pengaruhnya turut membentuk frame besar yang disusun redaksi terkait suatu isu atau peristiwa. Rutinitas tersebut termasuk hubungan kerja antar bagian di Jawa Pos. Dahlan Iskan sebagai CEO kala itu sedikit banyak masih berpengaruh pada kerja redaksional, terbukti dengan perhatiannya pada isi berita Jawa Pos dan tak segan memberi teguran jika ada isi berita yang menurutnya kurang ideal. Redaksi Jawa Pos pun selalu mengakomodasi keinginan Dahlan Iskan termasuk dengan menerbitkan tulisan-tulisan Dahlan di halaman pertama (meskipun secara layout halaman tak layak muat), dan mengubah produk beritanya sesuai kritik atau teguran yang disampaikan Dahlan.
3. Tiga frame besar Jawa Pos terkait kasus dan Pansus Century resmi menjadi kebijakan redaksional. Kebijakan redaksional, yang di Jawa Pos disebut policy redaksi, juga harus ditaati oleh setiap awak di Jawa Pos. Meski begitu, menurut wartawan Ekonomi-Bisnis Jawa Pos, Restu Distia, keberpihakan terkait pro-kontra terhadap kebijakan *bailout* juga mewarnai para awak redaksi Jawa Pos. Namun, pro-kontra itu tak sampai timbul ke permukaan apalagi tampak dalam produk berita Jawa Pos. Restu juga mengungkapkan, yang jelas dan pasti adalah semua awak di Jawa Pos harus mengikuti semua kebijakan yang berkaitan dengan keredaksian.
4. Jawa Pos sebagai koran daerah turut andil dalam perkembangan wilayah Surabaya dan Jawa Timur. Peran Jawa Pos sebagai korporasi media di wilayah itu bukan hanya dalam hal penerbitan surat kabar. Jawa Pos lekat dengan

warga Jawa Timur khususnya Surabaya juga karena mengadakan banyak program sosial yang bekerja sama dengan segala elemen dalam masyarakat. Namun dalam kasus Century, seperti diketahui, Jawa Pos teguh berpihak dan sepakat dengan kebijakan *bailout* yang diputuskan pemerintah lewat Sri Mulyani. Hal itu tentu berseberangan dengan penilaian masyarakat awam, bahwa Sri Mulyani dan Boediono-lah yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Meski begitu, Jawa Pos tetap berkeinginan untuk mendidik warga Jawa Timur agar mengetahui duduk masalah yang sebenarnya. Cara ‘mendidik’ itu dilakukan Jawa Pos lewat penataan produk beritanya. Untuk mendukung dan menyampaikan frame besarnya, Jawa Pos melakukan pemilihan kata (diksi) dengan tepat, menyusun *angle* berita yang sesuai dan memuat pernyataan nara sumber yang pro dan mendukung, termasuk mereka yang menulis dalam rubrik opini. Dengan berbagai cara itu, meski tidak gamblang menyatakan keberpihakannya, Jawa Pos berharap warga Surabaya dan Jawa Timur menjadi paham dan tahu akar permasalahan sebenarnya, senada sesuai dengan frame besar yang digunakan Jawa pos.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam kerja penelitian ini, peneliti sungguh menyadari adanya beberapa kelemahan, kekurangan atau keterbatasan sehingga mungkin ada bagian kerangka pikir yang tak terakomodasi dan terkonfirmasi secara lengkap. Peneliti dalam hal ini juga melakukan pembatasan-pembatasan agar fokus penelitian dan pertanyaan pada bagian rumusan masalah dapat terjawab dan terjabarkan dengan cukup.

Kekurangan, kelemahan, keterbatasan dan/atau pembatasan, harapannya dapat dilengkapi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

Pertama, secara teoritis, paradigma konstruktivisme seperti terpapar pada bagian kerangka teoritis lebih banyak bermain pada level kognisi pada hal-hal yang bersifat laten dan tersembunyi, sesuatu yang berpengaruh namun kadang tak tampak. Peneliti pun akan fokus pada hal-hal laten tersebut dan mencoba mengungkapkannya ke permukaan. Terhadap bagaimana kebijakan redaksional Jawa Pos dalam memilih, menuliskan, dan menyatakan sikap lewat Jati Diri juga pada apa saja pengaruh yang menerpa Jawa Pos dalam melakukan kerja jurnalistiknya. Maka, dalam konteks kerja penelitian ini, peneliti tidak mendeskripsikan secara detil/lengkap tentang teknis proses penyusunan Jati Diri Jawa Pos di lapangan, mulai dari rapat redaksi, penentuan tema, penulisan Jati Diri, proses editing, hingga Jati Diri tersebut dirapatkan dalam ruang redaksi.

Kemudian secara teknis, berbagai kendala yang dihadapi peneliti di lapangan turut andil menorehkan kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Paling nyata terasa adalah sulitnya menembus jajaran redaksi Jawa Pos. Kesibukan dan minimnya ketersediaan waktu jajaran redaksi Jawa Pos juga membuat peneliti sulit mendapat keterangan dari redaktur penulis Jati Diri. Padahal keterangan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui realitas apa saja yang dihadapi/menerpa tiap penulis Jati Diri hingga mempengaruhi penulisan, maksud, dan nilai yang muncul dalam Jati Diri terkait.

Kekurangan yang disadari, terdapat juga pada bagaimana analisis teks dilakukan peneliti. Peneliti tidak menutup kemungkinan adanya kelengahan saat

membaca teks berulang-ulang, mencari tiap atribut, komponen atau kategori teks yang menonjol dan memaknainya secara objektif. Kelengahan ini mungkin menyebabkan kurang tepatnya interpretasi atau pemaknaan yang dilakukan peneliti. Termasuk kurang lengkapnya penelusuran atribut, komponen, atau kategori teks yang harusnya mungkin bisa semakin jelas menggambarkan frame teks Jati Diri Jawa Pos secara keseluruhan terkait Kinerja Pansus Century. Berbagai keterbatasan dan kekurangan di atas kiranya menjadi bahan kajian penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

C. SARAN

Kerja penelitian ini sangat disadari masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang peneliti jabarkan dalam bagian keterbatasan penelitian. Utamanya adalah kedalaman analisis konteks yang terhambat karena keterbatasan waktu subjek penelitian dalam hal ini jajaran redaksi Jawa Pos dan terbatasnya juga waktu yang dimiliki peneliti. Maka peneliti mencoba memberikan saran terkait penelitian ini, termasuk untuk penelitian sejenis yang dilakukan berikutnya.

1. Redaksi Jawa Pos idealnya memberi ruang lebih untuk pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian terhadap institusinya. Hal itu termasuk keterbukaan untuk menerima kritik dan saran yang membangun sebagai hasil dari penelitian tersebut. Dalam kebijakan redaksional, Jawa Pos juga harusnya berani menerima pemikiran yang kontra dari awak Jawa Pos sendiri. Hal itu demi menciptakan suasana kerja yang dinamis dan demokratis.

2. Rubrik Jati Diri, sebagai pernyataan sikap resmi dari redaksi Jawa Pos bisa dikonsep sedemikian rupa, termasuk sebagai sarana untuk mendidik pembaca. Apalagi Jawa Pos sudah begitu lekat dengan Jawa Timur dan Surabaya pada khususnya. Selayaknya pula, Jawa Pos ikut menimbang realitas dalam komunitasnya di Jawa Timur dan menjadikannya referensi dalam membangun sebuah frame dari isu atau peristiwa tertentu.
3. Untuk lebih jelas memahami penelitian framing dan konstruktivisme terutama terkait kasus dan Pansus Century, penelitian selanjutnya mungkin dapat membandingkan hasil penelitian ini dengan tajuk rencana media lain. Media yang dipilih bisa media-media yang jelas afiliasi politiknya seperti Jurnal Nasional atau Media Indonesia. Dengan perbandingan tersebut proses framing di tiap media akan lebih jelas terbaca dan kepentingan media semakin terang terungkap.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Abrar, Ana Nadhya. 2011. *Analisis Pers Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Endarmoko, Eko. 2007. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hidayat, Dedy N., dkk. (ed). 2000. *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, David T. 1995. *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iskan, Dahlan. 2009. *Warisan Go! Samola*. Surabaya: JP Press.
- Kovach, Bill dan Tom Rosentiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Kunczik, Michael. 1995. *Concepts of Journalism North and South*. (reprint). Bonn: Media and Communication Departement of Friedrich Ebert Foundation.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riff, Michael A. (ed). 1995. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rivers, William L., dkk. 1994. *Editorial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Scheufele, Dietram A. 1999. *Framing as a Theory of Media Effects*. (*Journal of Communication*; Winter 1999; 49, 1; ABI/INFORM Global pg. 103).
- Shoemaker, Pamela J. dan Stephen D. Reese. 1996. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content, Second Edition*. New York: Longman Publishers.
- Siahaan, Hotman M. dan Tjahjo Purnomo W. 1993. *Tajuk-Tajuk Dalam Terik Matahari 'Empat Puluh Tahun Surabaya Post'*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suwardi, Harsono. 1993. *Peranan Pers Dalam Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sumber hasil riset:

- Adiningsih, Fransisca Femi. 2004. *Pers dan Usulan Pencabutan TAP MPRS XXV/1966 (Analisis Framing tentang Pemberitaan Pencabutan TAP MPRS XXV/1966)*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Arifin, Pupung. 2008. *Profiling Nurdin Halid Dalam Editorial (Analisis Framing Pencitraan Nurdin Halid dalam Ulasan Rubrik "Catatan Ringan" dan "Usul-Usil" di Tabloid Olahraga BOLA Terkait dengan Kasus Pidana Ketua Umum PSSI)*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fenny. 2009. *Praktik Ideologi Media Cetak Pada Tajuk Rencana Penyerangan Massa AKKBB Oleh FPI Di Lima Koran Nasional*. Skripsi: Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya
- Puspitasari, M. Risa. 2009. *Profiling DPR dan KPK pada MBM TEMPO (Studi Analisis Framing Profiling DPR dan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di DPR oleh KPK pada Pemberitaan Majalah Tempo periode*

April 2008- Agustus 2008). Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Taruli, Florencia Margaretha. 2009. *Kebijakan Redaksional Dalam Penyuntingan Berita Di SKH Jawa Pos*. Kuliah Kerja Lapangan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumber media cetak:

Heryanto, Gun Gun. Opini: *Komodifikasi Kasus Bank Century*. Harian Pikiran Rakyat edisi 2 Maret 2010.

Iskan, Dahlan. Opini: *Hati Kecil Saya Untuk Sri Mulyani*. Harian Jawa Pos edisi 7 Desember 2009.

Tajuk Rencana. *Kata dan Bahasa Tubuh Anggota DPR*. Harian Jawa Pos edisi 8 Januari 2010.

Tajuk Rencana. *Mengawasi Kinerja Angket Century*. Harian Jawa Pos edisi 3 Desember 2009.

Tajuk Rencana. *Menguji Konsistensi Dewan*. Harian Jawa Pos edisi 10 Februari 2010.

Tajuk Rencana. *Pentas Anak TK Di Panggung Senayan*. Harian Jawa Pos edisi 3 Maret 2010.

Tajuk Rencana. *Pansus Century Mau ke Mana Lagi?*. Harian Jawa Pos edisi 19 Februari 2010.

Tajuk Rencana. *Pansus Harus Tetap Fokus*. Harian Jawa Pos edisi 20 Januari 2010.

Tajuk Rencana. *Setelah Pansus Bekerja*. Harian Jawa Pos edisi 23 Desember 2009.

Sumber internet:

<http://beritasore.com/2009/12/04/paripurna-dpr-tetapkan-30-anggota-pansus-angket-century/>. Akses: 24 Maret 2010, pk. 10.07 WIB.

http://kosmo.vivanews.com/news/read/13867_mayoritas_korban_antaboga_dari_jawa_timur. Akses 24 Mei 2010, pk. 12.50 WIB.

<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/01/06/8429/Gayus-Saya-Tak-Mau-Terpancing-Ruhut>. Akses: 7 April 2010, pk 17.45 WIB.

<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/01/14/8869/Panggil-Kalla-Daeng-Ruhut-Diprotos>. Akses: 7 April 2010, pk. 16.25 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2009/12/01/18483825/Inilah.Lima.Poin.Fokus.Penyelidikan.Angket.Century>. Akses: 23 Maret 2010, pk. 17.30 WIB.

<http://www.detiknews.com/read/2010/03/03/230542/1310723/10/fpd-cs-keok-opsi-c-dipilih-dpr-putusan-fpjp-dan-pms-bermasalah>. Akses: 7 April 2010, pk 17.15 WIB

<http://www.indonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&article=4749>. Akses: 21 Oktober 2010, pk. 21.45 WIB.

<http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=119329>. Akses 2 Juli 2010, pk. 16.07 WIB.

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=Mahasiswa+Skeptis+terhadap+Kerja+Pansus+Century+DPR+RI&dn=20091224035024>. Akses: 7 April 2010, pk. 17.21 WIB.

<http://www.rakyatmerdeka.co.id/wan/hal/1/view/322/Gayus-Lumbuun,-Kinerja-Pansus-Century-Yang-Paling-Maksimal>. Akses: 7 April 2010, pk. 17.21 WIB.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/11/14/brk,20091114-208353,id.html>. Akses: 24 Maret 2010, pk. 09.45 WIB.



- LAMPIRAN

JATI DIRI

Mengawasi Kinerja Angket Century

ANGKET Century menjadi "sengatan" pertama di era pemerintahan SBY-Boediono. Angket ini bisa dibilang istimewa. Pertama, pendukungnya paling banyak, sekitar 90 persen anggota DPR ikut teken. Dari 560 wakil rakyat, 503 membubuhkan tanda tangan. Ini masuk rekor dalam hal dukungan. Fraksi Partai Demokrat yang sempat dipersepsi berbagai pihak sebagai kelompok yang resisten, juga memberikan dukungan penuh.

Kedua, isunya sangat "sensitif". Sebab, secara otomatis angket ini akan memintai keterangan dua pejabat tinggi yang kini berada di episentrum kekuasaan: Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Muncul suasana kasus ini mengarah ke jantung kekuasaan.

Tak hanya perorangan (anggota DPR), tapi secara intitusi fraksi memberikan dukungan agar angket Century mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik pencairan dana Rp 6,7 triliun itu. Fraksi Partai Demokrat yang nota bene adalah "benteng" sesungguhnya pemerintah SBY di Senayan, sudah memberikan komitmen untuk membongkar tuntas kasus tersebut. Begitu juga FPDIP yang sejak awal sangat yakin adanya penyelewengan dalam *bailout* itu.

Sekarang yang harus dicermati publik adalah ke mana arah angket ini. Adakah kepentingan gelap yang tersembunyi di balik semangat semua pihak yang menginginkan untuk menuntaskan Century?

Petunjuk untuk menjaga pansus ini, paling tidak dari dua sinyal besar yang sering kita dengar selama ini. Pertama, kalangan yang meminta semua pihak agar tetap menjaga pansus tidak dirongrong atau digembosi oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, seruan agar pansus ini tidak bertujuan hanya membidik oran-perorang dalam konteks sasaran politik.

Kedua sinyal itu sama berbahayanya bila kita terlena mengawasinya. Kita tak menginginkan pansus ini tiba-tiba gembos di tangan jalan, seperti pansus-pansus sebelumnya. Semangat dan menyala di awal, tapi redup seperti api yang tersiram air.

Kita juga tak ingin ada pihak yang memanfaatkan pansus untuk kepentingan politik jangka pendek. Kita tidak dapat membayangkan, bila pansus ini bekerja seakan-akan pihak yang salah sudah ada sebelum penyelidikan dimulai. Dengan demikian, sudah ada skenario dengan target tertentu.

Tentu rakyat tidak menginginkan kedua sisi itu mengkristal dalam perjalanan pansus yang isunya begitu menggetarkan panggung politik nasional. Setelah pansus ini berjalan, tugas publik adalah mengawalinya. Ini dimaksudkan agar prosesnya tidak doyong ke kiri, maupun miring kek kanan.

Kerja pansus nanti harus terbuka. Publik harus memantau apa yang terjadi. Jangan sampai redup hanya karena persoalan kompensasi politik. Dalam istilah Amien Rais, jangan tombak ini menjadi tumpul hanya karena tebalnya amplop.

Belum hilang dari ingatan kita ketika sejumlah anggota DPR periode lalu begitu bersemangat mengusut para jenderal yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM. Semangat pengusutan itu tiba-tiba menjadi sayup-sayup, bahkan tak terdengar lagi, saat semua pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2009 lalu, ada jenderal. Atau angket kenaikan BBM yang hingga kini tidak pernah kita ketahui hasilnya.

Kali ini, kita tentu tak ingin angket ini menguap tak berbekas. Marilah kita kawal bersama. Bukan kita tak percaya dengan semangat menggebu para wakil rakyat, tapi sejumlah pengalaman di DPR yang berakhir kompromi membuat kita harus tak boleh memejamkan mata atau menutup telinga sedikit pun. Kita ingin angket ini tetap di atas rel yang benar. Mari kita kawal bersama (*)

GAGASAN

Psikotes untuk Calon Guru

MENINGKATKAN kesejahteraan guru dalam dekade terakhir ini berdampak pada kian diminatinya profesi itu. Sayang, tes masuk untuk profesi tersebut belum disesuaikan dengan tugas yang diembannya nanti.

Saat ini tes calon guru diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan bersifat otonomi daerah. Ujian penyaringan untuk CPNS daerah berbeda dengan CPNS pusat yang menyelenggarakan tes CPNS dalam beberapa putaran, yaitu tes tulis, psikotes, dan wawancara. Untuk daerah, tes CPNS hanya melalui tahap satu putaran untuk seluruh formasi, yakni tes tulis saja. Tidak ada tes psikologi.

Untuk calon guru, menurut saya, tes psikologi sangatlah penting. Pasalnya guru merupakan pen-



Menanti Pro

DRAMA panjang yang melilit anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samat Riyanto dan Candra M. Hamzah, akhirnya mencapai klimaks setelah sekian lama keduanya berjuang habis-habisan melawan resistensi Polri. Perjuangan itu membangkitkan simpati jutaan orang. Hasilnya, beberapa aksi demo pun terjadi di mana-mana.

Tak sia-sia, akhirnya kerja keras itu pun menghasilkan buah. Anggota KPK nonaktif Bibit Samat Riyanto dan Candra M. Hamzah pada 1 Desember lalu resmi bebas dari tuduhan sebagai tersangka. Ini sekaligus menjadi langkah awal yang baik untuk KPK dalam kinerja ke depan terkait tugasnya memberantas korupsi.

Harapan baru pun muncul terhadap KPK. Dengan kembalinya kedua anggota KPK tersebut, diharapkan koruptor-koruptor di negeri ini bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Pengaktifan kembali Bibit-Candra itu memungkinkan mereka untuk melanjutkan misi yang sempat terhenti. Pasalnya, heroisme yang muncul dari publik terhadap



O l e h

M. ROMANDHON M

Kausalitasnya dengan korupsi seolah tercium semacam i kongkalikong yang diperagak pelaku korupsi dengan para peradilan. Itulah sesungguhnya an yang berbahaya, bahkan aka bunuh gerakan KPK itu sendiri. Di sinilah sebenarnya letak k wutan hukum di Indonesia. S peradilan hukum memiliki ta jawab untuk mengatasi perma Di sisi lain, para birokrat penegal lebih sibuk dengan egoismenya, serta selalu terjerat dan tidak b dari nafsu pragmatismenya. I kebutuhan yang sebenarnya b

JATI DIRI

Setelah Pansus Bekerja

TIDAK ada kasus pengucuran dana talangan (*bailout*) untuk penyelamatan perusahaan—khususnya bank—yang sedang kolaps yang tidak mengundang kontroversi. Rapat pemeriksaan Pansus Angket Bank Century yang hari-hari ini diselenggarakan secara terbuka di gedung DPR membuktikan hal itu.

Ketika di gedung DPR Pansus Angket Century bekerja, di luar rakyat memperhatikan dengan seksama. Adalah hal yang wajar jika penelusuran terhadap kebijakan *bailout* jadi perbincangan hangat. Bagi Indonesia, ini adalah isu yang dilatarbelakangi pengalaman masa lalu.

Saat pemerintah mem-*bailout* puluhan bank pada krisis perbankan 1997-1998, banyak orang tidak mengerti. Bagaimana mungkin bank-bank yang kolaps karena ketidakpatutan pemilik sendiri "diselamatkan" dengan ratusan triliun rupiah uang rakyat. Lantas, sebagian dana itu justru "dibawa lari" oleh beberapa banker ke luar negeri.

Ironisnya lagi, saat bank-bank itu dapat disehatkan dan dijual kembali ke swasta, harganya justru jauh lebih murah daripada dana yang sudah dikeluarkan negara.

Dalam kasus Bank Century, memang ada kenyataan menarik. Seperti bisa disimak dalam sidang pansus dua hari terakhir, sama-sama mantan gubernur Bank Indonesia (BI) pun bisa berbeda pandangan tentang hal itu. Menjawab cecaran pertanyaan anggota pansus, Wakil Presiden Boediono (gubernur BI saat *bailout* Bank Century) kemarin bersikukuh bahwa *bailout* itu adalah langkah yang sangat diperlukan.

Bank Century, menurut penjelasan Boediono, memang bank kecil. Tapi, dalam kondisi krisis ekonomi global saat itu, kalau bank tersebut dibiarkan limbung, efeknya bisa menimbulkan krisis kepercayaan kepada perbankan. Bahkan, secara sistemik, dampaknya bisa merontokkan bank-bank lain.

Pernyataan Boediono memang bertentangan dengan pernyataan Burhanuddin Abdullah (gubernur BI sebelum Boediono). Di forum yang sama sehari sebelumnya, Burhanuddin menyatakan bahwa Bank Century tidak termasuk dalam 15 bank yang tergolong *systematically important bank* (SIB). Kalau terjadi apa-apa pada bank-bank dengan penguasaan sekitar 85 persen itu, bisa timbul dampak yang sistemik.

Menurut Boediono, penyelamatan bank tidak bisa dilakukan dengan sekadar melihat "daftar". Misalnya, apakah bank itu tergolong kecil atau besar. Sebab, harus dilihat fakta dan variabel-variabel lainnya. Yang jelas, penyelamatan dengan biaya yang terukur itu dilakukan dengan niat baik. Yakni, mengantisipasi agar tidak terjadi krisis lebih besar yang mengganggu perekonomian nasional.

Pemeriksaan oleh pansus masih akan berjalan panjang. Setelah penjelasan Boediono kemarin, pelacakan tentang latar belakang kebijakan *bailout* itu juga akan menghadirkan Menkeu Sri Mulyani.

Kita berharap Pansus Angket Bank Century tetap berjalan pada komitmen awalnya. Yakni, membuka dengan sangat transparan apa yang terjadi pada *bailout* Bank Century itu. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan politik yang ikut menunggangi.

Rakyat tentu menginginkan kasus itu segera tuntas. Sebab, dalam beberapa hal, kasus Bank Century sudah dirasakan mengganggu perekonomian dan kinerja pemerintahan. Kita semua tentu tidak mau terbelenggu oleh kasus tersebut. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. (*)

GAGASAN

Sehari tanpa Kendaraan Pribadi

MERESPONS KTT Kopenhagen, kini gerakan untuk mengurangi emisi karbon kembali digalakkan. Meski tak ada sebuah kesepakatan memuaskan dari pertemuan itu, upaya menjaga lingkungan yang sehat harus tetap dilakukan dengan konsisten.

Tak perlu dengan momen-momen yang wah, dalam rutinitas sehari-hari, kita bisa melakukan hal yang bisa menjaga kelestarian alam. Misalnya, gerakan sehari tanpa kendaraan pribadi. Hal itu tentu mengurangi emisi karbon yang cukup besar. Sisi positif lain lalu lintas

CONTOHLAH
SAYA, TIAP-
HARI TANPA
KENDARAAN

Mengarifi Kas

MASALAH yang paling menarik perhatian kita beberapa bulan terakhir ini adalah kasus Bank Century. Praktis tidak ada kegiatan lain yang menarik perhatian masyarakat, selain masalah tersebut.

Berita National Summit dan juga Program 100 hari Kabinet Indonesia II tenggelam oleh berita kasus Bank Century. Untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat, rapat terbuka Pansus Kasus Bank Century di gedung DPR disiarkan langsung oleh TV swasta.

Ternyata, perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap kasus itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Saat saya bertanya kepada redaktur dua koran terkemuka di Makassar apa isu lokal terkemuka, mereka mengatakan bahwa kasus Bank Century mengalahkannya isu lokal.

Demo mahasiswa terkait kasus Bank Century terjadi di banyak kota. Keributan saat demo 9 Desember 2009 di Makassar tidak bisa dilepaskan dari ketidakpuasan masyarakat, terutama mahasiswa dan pemuda, terhadap kebijakan Boediono dan Sri Mulyani dalam penyelesaian masalah Bank Century. Pembakaran terhadap foto kedua tokoh itu dimulai di Makassar.

Sebenarnya, bagaimana kita harus menyikapi kasus Bank Century itu? Menurut saya, kita perlu memilah masalah sehingga bisa melihat kasus tersebut lebih jernih dan tidak terjebak pada sikap apriori yang bisa menyebabkan kita kehilangan arah.

Ada beberapa aspek yang bisa kita tengarai berkaitan dengan kasus Bank Century, yang harus kita pilah-pilah.



O l e h

SALAHUDDIN WAHID

Pertama, masalah kebijakan per dana talangan. *Kedua*, adakah pel an hukum dalam penerapan ke itu? *Ketiga*, adakah dana talang akhimya masuk ke rekening mil yang terkait parpol atau orang se Presiden SBY?

Keempat, apa yang harus dil terhadap para pejabat BI yang tic hati dan tidak tidak profesiona menangani merger beberapa ba masalah menjadi Bank Century?

Sejumlah profesional dan ahli el seperti Faisal Basri, Christianto W dan Erry Ryana, berunjuk rasa kung kebijakan KSSK memberik talangan Rp 6,7 triliun. Menurut kebijakan itu telah menyelamatkan dari krisis keuangan yang mung jadi (dampak sistemik) dan masal talangan itu tidak perlu dipermas lagi. Kalau kita masih berkuat pa Bank Century, kita akan terting tidak bisa memanfaatkan mor pemulihan ekonomi global.

Sebaliknya, terdapat sejuml ekonomi dan perbankan yang tida dapat dengan pendapat di atas. M

Luna Maya Ters

SEBELUM 17 Desember 2009, hubungan pekerja *infotainment* dengan Luna Maya baik-baik saja. Hubungan itu sontak berubah setelah Luna Maya memaki-maki pekerja *infotainment* di *account* Twitter-nya. Para pekerja *infotainment* pun membalas dengan mengadukan Luna ke polisi.

Para pekerja *infotainment* memang berhak mengadukan Luna Maya ke polisi. Mereka memiliki alasan yang kuat: Luna telah menghina dan mencemarkan nama baik para pekerja *infotainment*. Perbuatan seperti ini, menurut UU No 11 Tahun 2008, pasal 27 ayat 3, merupakan perbuatan terlarang. Luna bisa diancam pidana enam tahun dan/atau denda Rp 1 miliar.

Bagaimana akhir perseteruan antara Luna dan pekerja *infotainment* ini kelak? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Yang jelas, berbagai pihak menyesalkan pengaduan pekerja *infotain-*



O l e h

ANA NADHYA ABR

mencari, memperoleh, memili nyimpan, mengolah, dan menyar informasi dengan menggunakan jenis sarana yang tersedia" (p ayat 1). Tetapi, UU No 11 Tahu melarang "setiap orang yang sen tanpa hak mendistribusikan d membuat dapat diaksesnya d elektronik dan/atau dokumen el yang memiliki muatan yang me kesusilaan" (pasal 27 ayat 1). Ini babkan individu tidak merde

JATI DIRI

Kata dan Bahasa Tubuh
Anggota DPR

"**BANGSAT!**" kata Ruhut Sitompul pada Rapat Panitia Angket Kasus Bank Century (6/1). Ada apa dengan "bangsat?" Mungkin juga tak ada yang salah dengan kata itu. Kalau *toh* akhirnya menjadi polemik, tentu bukan karena penggunaan kata "bangsat" yang punya makna kasar dan kotor semata.

"Diam kau," kata Gayus.

"Jangan bilang diam," sahut Ruhut.

"Satu kalimat, diam kau!"

"Kau yang diam bangsat!!!"

Perang kata terus bersahut dengan nada tinggi dan penuh emosi. Untuk ukuran sebuah forum terhormat yang pesertanya juga kaum terhormat, kalimat yang dilontarkan mestinya bukanlah rangkaian kata yang layak memantik emosi hingga seorang wakil rakyat hilang kendali. Kalimat itu malah termasuk remeh-temeh. Mengingat yang dirapatkan adalah hal yang sangat penting, disiarkan secara langsung, ditonton rakyat, jadi melorotlah mutu forum itu. Menjadi kurang terhormat, termasuk peserta rapatnya. Tapi, mengapa bisa muncul kata-kata kotor hanya karena lontaran kalimat seremeh itu? Itulah sebenarnya yang perlu kita kaji.

Seperti penilaian Gus Dur, wakil rakyat kita memang tak jauh berbeda dengan anak TK (taman kanak-kanak). Makna penyimbolan ini mungkin bisa sangat banyak, tapi yang paling menonjol tentu aspek kedewasaan. Seperti halnya anak TK, mereka punya sifat-sifat, misalnya, gampang bertengkar, tidak intelek, dan belum tahu sopan santun.

Demi rakyat, sudah seharusnya wakil rakyat bertengkar. Bahkan, kalau perlu, silakan berkelahi. Tapi, berkelahilah untuk rakyat. Berdebat untuk rakyat, juga bertengkar habis-habisan untuk rakyat. Meski demikian, bertengkarlah dengan cara yang terhormat dan lebih beradab. Bukan bertengkar dan berkata-kata kotor hanya karena gagal mengendalikan diri dan tak mampu menjaga etika.

Ketika Tim 9 mencecar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Bank Century, perhatian dan harapan masyarakat sesungguhnya tertumpu pada kualitas pertanyaan para wakil rakyat yang kita pilih itu. Tapi, kenyataannya, kita lebih sering kecewa karena pertanyaan-pertanyaan anggota DPR tidak esensial dan kurang bermutu. Padahal, kalau para wakil rakyat itu bisa bertanya dengan kualitas yang lebih baik, rakyat akan terpuaskan meski ketika berdebat tak dibarengi dengan bahasa tubuh, misalnya tunjuk-tunjuk muka, dan kata-kata kasar.

Perlu diingat, masyarakat adalah pihak yang tidak melulu memihak sikap para anggota DPR itu. Sesungguhnya, masyarakat adalah pihak yang juga bisa menerima bila kebijakan-kebijakan yang diambil dalam memutuskan langkah penyelamatan terhadap Bank Century ternyata punya manfaat positif yang lebih besar untuk perekonomian Indonesia.

Kenyataan bahwa keputusan *bailout* merupakan kebijakan yang tepat atau sebaliknya, adalah forum ini juga yang menilainya. Bukan karena salah satu pihak lebih kekar ototnya atau wakil rakyat lebih kasar perilakunya.

Sudah semestinya para wakil rakyat itu juga punya sikap elegan dalam "mengadili" mereka yang diduga bersalah dalam mengambil kebijakan. Salah atau benar, rakyat akan bisa menerima. *Toh* seperti prediksi banyak pihak, apa pun hasil pansus, tak akan banyak berdampak. (*)

GAGASAN

Gayus-Ruhut seperti Anak SD

RAPAT Pansus Century yang seharusnya bertujuan mengungkap dana aliran *bailout* Century sudah keluar dari konteks rapat. Kejadian memalukan mewarnai rapat itu. Dua anggota pansus, Ruhut Sitompul dan Gayus Lumbuun, adu mulut yang disertai makian kata-kata kotor. Hampir semua stasiun televisi menayangkan tragedi tersebut.

Menurut saya, hal itu sangat tidak pantas diucapkan, apalagi dalam forum terhormat yang pastinya disaksikan jutaan

Pelajaran



O l e h

AHMAD TOHARI

Gus Dur adalah orang yang sangat tahu diri, merasa dirinya biasa, dan dengan orang lain. Itu pelajaran dan keteladanan yang saya dapatkan

KANJENG Nabi Muhammad SAW pernah tidur di lantai tanah dengan hanya beralas tikar daun kurma. Maka, ada tanda-tanda guratan pada pipinya yang mulia ketika beliau bangun. Hal yang hampir sama diamalkan mantan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pekan lalu kembali ke haribaan Sang Khaliq.

Pada 1995, Gus Dur tidur dua malam di rumah saya yang sederhana di kampung. Malam pertama dia mau tidur di dipan kayu yang saya sediakan. Tetapi, malam kedua dia memilih sendiri tidur di karpet murahan yang menutup lantai ruang tengah. Gus Dur tampak santai dan tidur amat lelap. Kepalanya hanya tersangga bantal sandaran kursi.

Perihal Gus Dur suka tidur di karpet sudah saya ketahui sejak lama. Ketika naik haji bersama pada 1988, saat tidur di hotel, Gus Dur memilih karpet daripada kasur kelas satu kamar hotel berbintang lima. Tapi, itu karpet kualitas super. Sedangkan saya hanya mampu membeli karpet murah yang kasar, lagi pula debunya tak pernah disedot.

Kami percaya, Gus Dur melakukan semua itu dengan enak, tanpa pretensi apa pun. Tapi, istri saya menjadi tak bisa tidur dan sepanjang malam sering mengusap air mata. Saya pun merenung dalam kesadaran bahwa semua perilaku orang berilmu mengandung pelajaran. Maka, pelajaran apa yang sedang dibagikan Gus Dur kepada kami?

Bertahun-tahun pertanyaan itu me-

ngusik jiwa saya. Akhirnya saya dapatkan jawaban dan mudah-mudahan mendekati kebenaran. Pada rela tidur di lantai, Gus Dur sesungguhnya sedang mengajari kami bahwa hakikat diri bahwa manusia bat apa pun sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Kemuliaan adalah Allah semata. Maka, manusia pun, tidak pantas merasa mu-pantas minta, apalagi menuntut-liakan. Jadi, semua manusia se-nya rela tidur di lantai karena se-guhnya tak ada kemuliaan be-melainkan hak Allah.

Mungkin, jalan pikiran ini *nyufi*. Maka, saya mulai men-

Meragukan Sa

O l e h

JABIR ALFARUQ

TINDAK lanjut rekomendasi Tim 8 yang ditugasi mencari fakta atas persetujuan cicak vs buaya adalah perlunya lembaga baru yang khusus menangani mafia hukum. Lembaga khusus ini diperlukan karena mafia hukum telah begitu jauh merusak sistem peradilan dan penegakan hukum di negeri ini.

Secara gagasan, lahirnya satgas mafia hukum sangat dibutuhkan demi tegaknya hukum yang berharkat dan bermartabat. Hukum di negeri ini diharapkan bisa tegak dan mencerminkan rasa keadilan. Bukan seperti sekarang karena prinsip hukum sering dipelestickan: semua manusia sama di depan hukum, tetapi tidak sama di depan penegak hukum.

Namun, bila dilihat dari sisi eksistensi dan kewenangan yang dimiliki, banyak pihak meragukan satgas mafia hukum bisa memenuhi harapan awal sesuai yang digagas Tim 8. Mereka tidak memiliki kewenangan cukup untuk

Setelah amandemen keempat U konsekuensi amandemen itu n ruskan lahirnya komisi-komisi Harapannya, dengan adanya komisi negara, penegakan hukum berjalan dengan baik. Lembaga hukum bisa terjaga kehormatannya penciptaan pemerintahan yang bersih segera terwujud. Diper sekarang kurang lebih ada 120 negara. Ini jumlah yang cukup membutuhkan anggaran negara cukup besar pula.

Namun, pertanyaannya, berapakah komisi yang ada itu eksis dan ben memenuhi harapan rakyat? Komisi di bidang pengawasan lembaga hukum bisa kita jadikan contoh. Kita ingin memiliki lembaga kerop-

JATI DIRI

Pansus Harus Tetap Fokus

IBARAT sebuah alur cerita, hingga kemarin publik belum bisa menebak kira-kira bagaimana *ending* hasil kerja Pansus Hak Angket Bank Century di DPR. Hari demi hari rakyat Indonesia—yang sebagian besar memang awam—disugahi dengan perdebatan-perdebatan tentang subjek yang mungkin tidak terlalu mereka mengerti.

Publik tentu sangat menghormati para wakil rakyat di Senayan saat ini sedang menggunakan hak konstitusional menjalankan hak angket. Yakni, mempertanyakan kebijakan *bailout* Bank Century Rp 6,7 triliun yang diduga tidak patut. Namun, mereka tetap menuntut para anggota pansus menjalankan haknya dengan bertanggung jawab.

Sayangnya, dalam sidang-sidang yang sebagian disiarkan secara langsung itu kadang rakyat punya kesan para anggota pansus seperti tidak fokus. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para anggota sering di luar konteks, tidak ke inti persoalan, sehingga terkesan bertele-tele.

Harus diingat bahwa kerja pansus dibatasi waktu. Mereka tetap harus bisa bekerja dengan efisien dan terukur. Jangan sampai sidang pemeriksaan saksi yang sering berlangsung sampai larut malam itu malah dikesankan kurang baik. Jangan sampai pelaksanaan hak angket yang di mata rakyat merupakan pertunjukan dan pembelajaran demokrasi (seorang wakil presiden pun tunduk ketika diperiksa) malah diartikan sebaliknya.

Rakyat tidak bisa menunggu terlalu lama. Mereka tentu segera ingin tahu akhir ceritanya nanti seperti apa. Siapa yang memikul tanggung jawab dan konsekuensinya apa. Untuk menjawab ini, tidak bisa tidak, Pansus Hak Angket Bank Century harus bekerja dengan sungguh-sungguh.

Karut-marut di balik *bailout* bank milik Robert Tantular itu memang begitu kental. Termasuk berbagai prasangka yang menyertainya. Fakta inilah yang membuat pembentukan pansus sejak awal mendapatkan legitimasi dari rakyat. Publik ingin tahu benarkah penyelamatan bank ini didasari oleh berbagai kepentingan (*vested interest*) di luar yang disyaratkan undang-undang? Namun, yang harus diingat, legitimasi rakyat itu bisa pupus dan berbalik jika para anggota pansus tidak bisa mengelola dengan baik.

Selain menunggu hasil konkret dari para anggota pansus, para aktor politik di luar Senayan juga harus bisa mengendalikan diri. Mereka harus menghormati proses politik yang kini sedang berjalan di gedung DPR tersebut. Tangan-tangan mereka tidak boleh bermain yang malah bisa memperunyam keadaan.

Meski kebenarannya sudah banyak dibantah, isu adanya *deal-deal* di luar Senayan yang melibatkan pimpinan partai politik dengan presiden sangat kontraproduktif bagi pansus. Misalnya, soal isu rencana SBY yang mendadak mau mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa hari lalu langsung memberikan efek negatif ke bursa.

Seperti yang diungkapkan oleh pengamat Christianto Wibisono, kasus yang melilit Bank Century memang sangat pelik. Dia mengibaratkan sejak lahir bank ini sudah cacat. Bahkan, ketika besar menjadi monster yang malah memakan ibunya. Kita tahu, tugas pansus untuk mengungkap orang-orang yang memelihara dan mengambil keuntungan dari "sang monster" itu (kalau ada) juga tidak mudah. Namun, biarlah kita berikan kesempatan supaya mereka bisa menyelesaikan tugasnya. (*)

GAGASAN

Jangan Berhenti Buru Koruptor

KPK telah menunjukkan taringnya dengan menahan Anggodo Widjojo. Apa yang dilakukan KPK tersebut perlu diapresiasi. Kinerja mereka harus dilanjutkan dengan menangkap koruptor lainnya. Di sisi lain, kita pun berharap aset negara yang dicuri koruptor dapat kembali ke pangkuan kita. Hingga kini negara kehilangan triliunan rupiah akibat kerakusan koruptor.

Sekarang pun masih banyak koruptor yang tak tahu rimbanya, tapi negara juga belum mampu berbuat apa-apa. Karena itu, aparat Kejaksaan Agung dan KPK jangan pernah berhenti mencari para koruptor yang melarikan bejubun aset negara ini.

Ayo, buktikan bahwa aparat masih bertaji. Keresahan masyarakat akan terobati jika aparat mampu menuai prestasi dengan menangkap

Perang Maya

O l e h

A. SAFRIL MUBA

ANCAMAN *Google* untuk hengkang dari Tiongkok, Kamis lalu (14/1), memantik babak baru perang dagang antara Amerika Serikat dan negara pasar internet terbesar di dunia itu. Ancaman perusahaan mesin pencari di internet asal AS itu dipicu tindakan Pemerintah Tiongkok membol bol akun Gmail milik pejuang hak asasi manusia di Tiongkok. *Google* menilai tindakan tersebut kelewatan setelah Pemerintah Tiongkok memblokir kata-kata tertentu dari hasil pencarian, terutama yang berkaitan dengan gerakan politik.

Sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia, Tiongkok memang pasar potensial bagi perusahaan-perusahaan internet AS. Tahun lalu pengguna internet di negara itu mencapai 384 juta orang, naik hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. *Google* dengan cerdas memanfaatkan pasar internet nomor satu di dunia ini melalui beroperasinya *Google.cn* sebagai pengelola manajemen perusahaan itu di Tiongkok. Hanya, *Google.cn* tidak leluasa bergerak karena Tiongkok gemar menyensor hasil pencarian yang didapatkan pengguna internet.

Peralihan Tiongkok dari ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar sosialis menjadikan perusahaan-perusahaan asing belum bisa bebas berinvestasi di negara ini. Seperti dikatakan Yao Jian, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok (15/1), Pemerintah Tiongkok memiliki kewenangan besar untuk mengatur operasi perusahaan-perusahaan asing agar tunduk pada hukum, kepentingan umum, tradisi, dan kultur yang berlaku.

Perluasan Kompetisi
Ketegangan Tiongkok-*Google* menan-

dai perluasan kompetisi antara AS dan Tiongkok. Kedua negara telah terlibat berbagai persaingan yang tak hanya memengaruhi hubungan diplomasi antara mereka. Dalam hubungan dagangan, misalnya, Tiongkok kini dipandang sebagai negara pengekspor tunggal di dunia. Banjir ekspor Tiongkok ke AS telah membuat satu-satunya adidaya ini mengalami defisit perdagangan. Situasi makin tegang setelah pemerintah Tiongkok mengimitasi produksi Tiongkok yang diekspor ke AS terkontaminasi bahan beracun yang membuat plastik dan baterai.

Kini, perang dagang tidak hanya berfokus pada aksi nyata, tetapi memunculkan perang maya. Setelah memukul mundur Tiongkok di kompetisi nyata, Sang Naga baru saja merontokkan dominasi Paman Sam di dunia maya. Berdasarkan survei terbaru, di antara sepuluh situs yang paling banyak diakses *netter* di seluruh dunia, sembilan berasal dari AS, yakni *Yahoo*, *Facebook*, *Youtube*, *Windows*, *Microsoft Network*, *Blogger*, *Wikipedia*, dan *My Space*. Situs lain yang menduduki peringkat sepuluh adalah *China.com*, situs pencari milik Tiongkok yang menduduki peringkat sembilan.

Data tersebut menampakkan bahwa pasar internet masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan AS. Penguasaan dunia maya terasa menyentak bagi Tiongkok, sebab di eranya informasi seperti sekarang ini, kontrol harga dan pengaruh di jaringan internet me-

Kegagalan H

O l e h

ADIG SUWANDI

MESKI dari sisi pemberitaan dan analisis media massa kalah pamor daripada pemanggilan sejumlah pejabat negara oleh Pansus Bank Century serta konflik internal di tubuh Polri yang melibatkan Komjen Susno Duadjid dan Kapolri, kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, khususnya gula, telah membuat banyak pihak galau, resah, dan cemas.

Harga gula yang harus dibayar konsumen akhir (*end users*) hingga Rp 11.000 per kg dalam beberapa bulan terakhir telah menjadi fenomena yang secara kasat mata menimbulkan kegamangan. Anehnya, dalam konteks gula, posisi pemerintah sering dilematis. Atas nama akuntabilitas publik, keberadaan gula sebagai komoditas strategis bemuansa politis membuat keputusan apa pun yang diambil pemerintah

kan konsekuensi logis mekanisme pasar. Secara deterministik, harga naik saat permintaan lebih sedikit daripada penawaran, dan otomatis turun begitu jumlah produksi ditawarkan melebihi permintaan. Manajemen suplai menjadi kunci dalam stabilisasi harga. Sementara itu, pemerintah terkait pengendalian perilaku hanya mungkin terjadi melalui intervensi bila stok bertambah. Kondisi yang terjadi sejak 1998 tersebut menyebabkan berbagai imbauan dan aturan main penetapan harga eceran tertinggi (*price cap*) tidak lagi sakti. Terakhir,

JATI DIRI

Menguji Konsistensi Dewan

Hasil sementara Pansus Angket Bank Century cukup mengagetkan. Ada perubahan peta politik di Senayan. Koalisi parpol yang bergabung dengan pemerintah benar-benar pecah. Hanya Partai Demokrat –sebagai penyangga utama– dan PKB yang berada di belakang pemerintah untuk membenarkan *bailout* Rp 6,7 triliun itu.

Empat anggota kongsi lain –Golkar, PKS, PAN, dan PPP– kompak menilai ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ini berarti Wapres Boediono yang saat itu menjadi gubernur BI dan Menkeu Sri Mulyani sebagai ketua KSSK harus bertanggung jawab.

Sikap Golkar dan PKS sejak awal sudah bisa ditebak. Mereka sangat kritis seperti fraksi-fraksi nonistana; FPDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura. Yang mengejutkan dan mengubah peta itu adalah Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Kedua fraksi yang disebut terakhir ini sempat dipetakan sebagai bumper istana. Semua analisis menempatkan *positioning* mereka akan satu langkah dengan Demokrat.

PAN dan PPP membuat analisis politik berantakan. Kedua “anak manis” itu memilih arah yang berbeda dengan induk koalisi. Ketua FPAN Asman Abnur menyatakan fraksinya menemukan 60 pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana perbankan, pencucian uang, dan korupsi. PPP tak kalah garang. Melalui juru bicaranya, M. Romahurmuzy, partai yang mendapat jatah dua menteri di kabinet tersebut menilai KSSK belum melakukan semua amanat Perppu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK saat memutuskan *bailout*.

Ibarat main bola, posisi sementara 7-2. Kubu yang menyatakan *bailout* Bank Century mengandung pelanggaran unggul jauh. Kalaupun *voting*, di antara 30 suara di pansus, Demokrat (8 kursi) dan PKB (2) tentu kalah telak oleh 7 fraksi lain yang mengantongi 20 suara.

Skor itu bukan semata-mata angka menang atau kalah. Di balik dinamika peta politik tersebut sebenarnya ada pendidikan politik yang harus ditunjukkan wakil rakyat. Yakni, konsistensi. Apakah para wakil rakyat itu akan tetap teguh terhadap kesimpulan awal mereka?

Para wakil rakyat harus sadar bahwa Pansus Angket Bank Century adalah etalase parlemen. Dari dinamika pansus inilah, jutaan rakyat bisa mengintip apa yang dilakukan para wakilnya. Tayangan langsung sidang-sidang pansus lewat televisi telah menjadi salah satu acara favorit.

Sikap dan pandangan fraksi-fraksi sudah terekam jelas di benak publik. Siapa yang membenarkan *bailout* dan siapa yang kritis terhadap pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun itu sudah terpetakan. Bahkan, masyarakat sudah mengenal visi dan karakter masing-masing anggota pansus.

Betapa sedihnya kita bila *show-show* yang dilakukan para wakil rakyat tersebut ternyata merupakan atraksi tawar-menawar politik. Umpamanya, ada yang berubah sikap karena takut kehilangan kursi menteri. Atau, mereka berubah pikiran karena mendapat konsesi politik lain.

Kita semua tentu tidak ingin panggung pansus itu hanya sebagai panggung sandiwara. Para wakil rakyat yang merupakan kelompok elite harus bisa memberikan teladan kepada para rakyat yang mereka wakili. Keteladanan tersebut adalah sejalanannya ucapan dengan tindakan. Yang diucapkan lidah itulah yang dilakukan tangan dan kaki. Dari sinilah kepercayaan akan terbangun. (*)

GAGASAN

Kaji Ulang Pembelian Pesawat

ULASAN Alvin Lie yang menganalisis efisiensi biaya sewa pesawat kepresidenan (*Jawa Pos*, 8/2/10) telah membuka pengetahuan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat tentu mudah termakan pernyataan pemerintah bahwa dengan membeli pesawat kepresidenan, negara menghemat pengeluaran Rp 100 miliar dalam lima tahun. Padahal, menurut Alvin, asumsi itu sama sekali tidak benar.

Sepertinya, pemerintah tidak memikirkan masak-masak sebelumnya bahwa pengeluaran tersebut justru ada

Paradoks Renc

TIDAK seberapa lama berselang dari kontroversi pembelian mobil dinas pejabat yang menghabiskan dana sangat besar, tahun ini, pemerintah kembali akan membuat peraturan presiden (perpres) tentang kenaikan gaji pejabat tinggi negara (JP, 2/2/2010).

Karena pembahasannya sudah tuntas di DPR dan koor persetujuan diberikan, maka ditilik dari ilmu kebijakan publik dan etika administrasi negara, rencana itu baik-baik saja dan absah adanya. Ditilik dari otoritas keuangan yang dimiliki Menkeu, disertai kepemilikan data perimbangan keuangan, kebijakan tersebut normal saja.

Persetujuan DPR itulah salah satu prasyarat kebijakan yang baik. Tak boleh menimbulkan kerugian negara –sesuai dengan semangat reformasi birokrasi– karena diasumsikan sebagai bagian dari renumerasi dan diharapkan memperlancar tugas serta bisa meningkatkan produktivitas kerja pejabat negara.

Berbeda dengan kasus Century yang panas, kebijakan tersebut akan aman-aman saja, bukan diskresi, dibuat secara rasional. Total anggaran 158 triliun mungkin akan diterima secara keseluruhan pegawai dari golongan kecil sampai pejabat tinggi, hanya tunggu momentum saja.

Politik Anggaran

Kebijakan itu akan lancar mengingat DPR dan pembuat kebijakan secara teoretis akan diuntungkan dengan kenaikan gaji tersebut. Sulit mengharapkan akan ada tantangan dalam proses pelaksanaannya.

Mungkin, pemerintah akan menyangkal kalau ada yang mencoba mengasumsikan dan berpikir kritis bahwa



O l e h

M. MAS'UD SAID

penetapan kenaikan gaji itu adalah pesona eksekutif kepada legislasi *good approach* kepada lembaga MPR, dan lembaga negara lainnya.

Namun, kalau kita ingin merencanakan politik anggaran, kemungkinan saja terjadi. Persoalannya ialah kebijakan kenaikan gaji tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan disiplin psikologis “masyarakat yang terhormat”. Gaji tidak mungkin bisa dinaikkan hanya karena kebutuhan, apalagi keinginan orang-orang yang digaji. Kenaikan gaji itu harus melihat besaran golongan PNS terkecil agar ada keadilan.

Di negara-negara maju, kenaikan gaji pejabat tinggi termasuk hal yang wajar. Sewaktu Bill Clinton menjadi presiden AS, pada Januari 1998, kenaikan gaji pejabat tinggi disetujui. Keputusan ini disahkan oleh Congressional Budget Office –semacam panitia anggaran– karena pemerintah tidak bisa mengurangkan pengeluaran belanja rutinnya di tengah krisis ekonomi Amerika.

Teorinya, kurcurnya anggaran akan tercermin keberpihakan pemerintah kepada golongan miskin, janda tua, atau infrastruktur desa miskin di perbatasan sangat

Menggaji Pe

O l e h

ADNAN TOPAN HUSC

DALAM kurun waktu 2009 dan awal 2010, pemerintah berturut-turut mengemukakan program yang sangat tidak populer. Mulai pembelian mobil dinas mewah bagi para pejabat negara, rencana pembelian pesawat kepresidenan, renovasi pagar istana, hingga yang terakhir, ide menambah kocek pejabat publik kita melalui kebijakan menaikkan gaji pejabat negara.

Meskipun usul kenaikan gaji 20 persen belum diimplementasikan, tekad menambah pundi-pundi bagi pejabat negara itu sepertinya belum surut. Ini mengingat hingga kini Presiden SBY tak pernah menginstruksikan adanya penundaan atau pembatalan. Artinya, kemungkinan urungnya rencana menaikkan gaji pejabat tinggi yang santer beberapa waktu lalu merupakan strate-

dilakukan pegawai rendah.

Jika alasannya gaji pejabat negara Indonesia masih rendah, pertanyaannya, apakah yang diterima pejabat negara setiap bulan hanyalah sekedar mata? Lalu, bagaimana pendapat lain-lain yang secara rutin diumumkan oleh mereka? Pada titik ini, pemerintah sepertinya tidak jujur dalam menyampaikan informasi.

Meskipun yang disampaikan pemerintah hanyalah usul kenaikan gaji pejabat, dalam sistem hitungan penganggaran mana pun, kenaikan gaji pokok akan membawa konsekuensi pada

JATI DIRI

Pansus Century Mau ke Mana Lagi?

PANITIA Khusus Hak Angket Bank Century akhirnya memberikan kesimpulan sementara yang kurang greget. Yaitu, sekadar konklusi bahwa ada permasalahan terkait dengan aliran dana talangan (*bailout*) kepada bank yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara tersebut.

Kesimpulan fraksi-fraksi bahwa ada masalah di Bank Century itu tentu kurang baru buat kita karena sejak awal sesungguhnya gelagat permasalahan tersebut telah begitu kuat. Dari Bank Indonesia sebagai hulu hingga cara menyalurkan dana talangan sebagai hilirnya. Dan kita semua sudah tahu secara garis besar. Artinya, kesimpulan bahwa di Bank Century ada masalah tentu kurang setara dengan kehebohan jalannya persidangan yang digelar secara maraton selama ini. Masih ingatkah dengan kata-kata kotor yang bertaburan di saat sidang berlangsung?

Padahal, hasil akhir sidang-sidang Pansus Century sudah harus diumumkan pada sidang paripurna DPR RI, Selasa, 2 Maret mendatang. Memang, setidaknya masih ada waktu dua belas hari lagi bagi anggota pansus untuk mengusut lebih dalam dan lebih jauh ke mana aliran dana talangan Rp 6,67 triliun itu. Tapi kalau hingga detik ini pansus baru sampai pada kesimpulan Century bermasalah, betapa jauh sebenarnya perjalanan yang harus ditempuh pansus untuk sampai kepada simpul permasalahan yang sebenarnya.

Simpul-simpul itu, misalnya, kejelasan aliran dana yang beberapa waktu lalu ditengarai bermuara ke salah satu partai dan pasangan capres peserta pemilu. Seperti apa bentuk konkret kesalahan Boediono dan Sri Mulyani yang tak henti-hentinya didakwa para pendemo sebagai garong Century? Bagaimana modus pembayaran nasabah dari dana Boedi Sampoerna yang tercatat di Antaboga Delta Sekuritas?

Lebih jauh lagi, bagaimana kira-kira pansus bakal memberikan jalan keluar bagi Sri Gayatri dan kawan-kawan sebagai nasabah yang kini terombang-ambing ketidakjelasan nasib depositonya?

Sidang paripurna segera digelar. Sekali lagi, dua belas hari tentu bukanlah waktu yang lama. Dan waktu yang pendek ini tentu akan dipakai sebaik-baiknya oleh Tim Sembilan sebagai inisiator hak angket, juga pihak yang merasa terancam oleh hasil akhir pada sidang paripurna.

Tim Sembilan telah mencoba mencari kekuatan dengan cara meminta dukungan kepada sejumlah tokoh. Maksud kunjungan ke beberapa tokoh itu tentu sebagai upaya mencari tameng guna menangkis gencarnya lobi-lobi yang bertujuan melunakkan sidang paripurna nanti.

Pertanyaannya, kalau hingga hari ini hasil pansus baru sampai pada kesimpulan yang masih mentah seperti itu, akankah sidang paripurna mampu memberikan kesimpulan yang bisa melegakan kita semua?

Ingat, dalam gerilya politik dan lobi-lobi terhadap Tim Sembilan, banyak tawaran menarik yang memang jadi dambaan para politisi. Misalnya, tawaran kursi di kabinet kalau ada *reshuffle* nanti. Jika lobi-lobi seperti itu manjur, tentu kita bisa menebak ke mana arah pengusutan Pansus Bank Century. Kalau *toh* tidak berhenti pada jalan buntu, pasti akan melemah seperti yang kita khawatirkan sekarang ini. (*)

GAGASAN

Nggak Usah Gengsi-gengsian

BARU-baru ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan peringatan kepada lebih dari sepuluh rumah sakit (RS) di seluruh Indonesia yang mencantumkan label internasional namun belum memenuhi akreditasi internasional. Menurut Kemenkes, hanya ada satu RS di Indonesia yang mengantongi akreditasi internasional. Sedangkan RS internasional lainnya di Indonesia tampak seperti bodong.

RS-RS di Indonesia yang mengaku berkelas "internasional" semestinya berbenah diri terlebih dahulu. Usul saya, sebaiknya RS-RS tersebut memberikan angket kepada setiap pasien atau keluarga pasien selama dan sesudah perawatan di RS—menanyakan soal pelayanan yang sudah diberikan. Bila ternyata jawaban pasien berada dalam kisaran rata-rata

Nikah kok



O l e h

SYAMSUL ARIFIN

BEBERAPA tahun silam, saya pernah ditawarkan nikah lagi oleh seorang teman aktivis sebuah gerakan keagamaan di luar arus utama (*nonmainstream*). Kata teman itu, dalam jamaah pengajian yang dia ikuti, ada seorang wanita yang berstatus janda karena ditinggal "mati syahid" suaminya. Rupanya, suami janda tersebut meninggal setelah menjadi sukarelawan di daerah konflik antarumat beragama.

Atas tawaran yang tak terduga itu, saya menjawab secara halus, saya akan berkonsultasi dan minta izin kepada istri saya. Lalu, apa jawab dia? Dia berusaha meyakinkan saya bahwa dalam syariat Islam tidak dikenal adanya mekanisme perizinan dari istri pertama.

Saya sebenarnya telah belajar Islam sejak usia dini, termasuk apa yang disebut dengan *fiqh munakahat* (fikih pernikahan). Salah satu topik yang paling mengundang perbincangan adalah masalah nikah lebih dari satu istri (poligami). Sampai sekarang, saya tetap berpendirian, poligami merupakan modus pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi, praktik poligami tidak semudah membalik telapak tangan.

Bagi saya, izin istri pertama merupakan salah satu syarat terpenuhinya prinsip keadilan. Jadi, poligami tidak boleh dilakukan secara diam-diam (nikah siri).

Pengalaman beberapa tahun silam itu telah memberikan pengetahuan penting bahwa penggunaan mekanisme nikah siri, antara lain, disebabkan suami mau poligami, namun istri pertama tidak mengizinkan. Di luar alasan tersebut, masih banyak alasan lain. Mungkin ada seratus satu macam alasan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa nikah *kok*

harus diam-diam?

Dalam pandangan Islam, pernikahan memerlukan "publisitas". Artinya, pernikahan perlu diketahui khalayak luar, bukan hanya kedua mempelai serta keluarganya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan agar dilakukan *walimah* (perayaan) dalam format acara yang bersahabat. Mengapa nikah memerlukan "publisitas"? Secara sosiologis, dengan melibatkan publik, ikatan pernikahan bertambah kuat karena ikrar nikah disaksikan banyak orang.

Kedua, keterlibatan publik dalam pernikahan bisa memberikan tekanan kepada kalangan luar agar tidak merajut fitnah terhadap legalitas pernikahan. Di sinilah kita menemukan praktik pernikahan yang bernilai ibadah. Jika ibadah lain utamanya berada pada ranah ri'iyah, dianjurkan menjaga kerahasiaan, nikah Nabi Muhammad SAW malah dianjurkan untuk melakukan *walimah* yang bermaksud, antara lain, melindungi diri dari melakukan pergunjingan.

Ketiga, nikah yang dilakukan secara normal—tidak dengan cara diam-

Mutualisme UU

PERDEBATAN seputar Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Material Peradilan Bidang Perkawinan (RUU HMPBP) yang kini masuk dalam salah satu program legislasi nasional 2010 kian ramai. Khalayak kian gencar memperbincangkan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan siri, mut'ah (kontrak), perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian tanpa di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, menikahkan atau menjadi wali nikah.

Sebagaimana banyak diberitakan, draf RUU HMPBP menyebutkan ancaman hukuman pidana bervariasi, mulai 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Bagi yang pro, salah satu alasannya adalah untuk menjaga hak-hak perempuan



O l e h

NUR AISYAH*

Di lapangan, tidak sedikit hak perempuan dan anak terabaikan sebagai akibat dari nikah siri. Pejabat Dirjen Islam Kementerian Agama Nasir Umar pun mengakui korban akibat nikah siri sudah banyak terjadi. Dalam konteks ini, penulis menaruh perhatian terhadap pemberlakuan UU baru yang konon sebagai penyempurnaan

JATI DIRI

Pentas Anak TK di Panggung Senayan

DUA hari terakhir kemarin Senayan menjadi pusat perhatian. Rapat Paripurna Pansus Century menyedot perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Tayangan langsung televisi menjadi tontonan populer dan dinantikan pemirsa.

Paling tidak ada dua hal yang membuat publik sangat antusias. Pertama, isu pansus itu sendiri. Kasus Bank Century itu telah menyeret tokoh penting di negeri ini. Yakni, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Muljani. Keduanya dianggap bertanggung jawab dalam *bailout* Rp 6,7 triliun yang memunculkan pro dan kontra itu.

Hal kedua yang membuat acara tersebut menjadi tontonan nomor wahid adalah gaya para politisi. Paripurna benar-benar menjadi suguhan yang nikmat. Hujan interupsi dan bersilat lidah menjadi daya tarik yang luar biasa. Hari pertama, kita disuguhi kericuhan yang berawal dari langkah Ketua DPR Marzuki Alie yang menutup rapat secara sepihak. Kisruh dan gaduh. Para wakil rakyat saling dorong dan saling hujat dengan kepala panas. Bahkan, karena tak bisa menahan emosi, ada anggota DPR yang naik ke panggung dan nyaris memukul Marzuki Alie.

Seperti pentas drama, pada hari kedua, suasana panggung berubah. Kanal interupsi terbuka secara luas yang membuat para anggota DPR berlomba-lomba interupsi. Nurul Arifin, artis yang memperkuat Partai Golkar, saat mendapat kesempatan berbicara justru mengkritik rekan-rekannya yang hanya berlomba pidato dan menghabiskan waktu. Parade adu argumentasi. Namun, Nurul Arifin juga terperangkap dalam lomba pidato tersebut. Kejadian hari kedua tak kalah menarik dengan hari pertama. Banyak penonton televisi tak beranjak dari tempat duduk karena tak ingin melewatkan momentum tragis atau lucu yang bisa terjadi setiap saat, termasuk isi pidato atau interupsi yang tak bermutu.

Sebagai tontonan, apa yang terjadi di DPR itu memang menghibur. Bahkan, mereka lebih lucu dan lebih menarik daripada dunia *entertainment*. Cuma, bila kita berbicara tentang perspektif DPR adalah lembaga politik yang berbicara tentang kebijakan dan arah bangsa, tentu kita mengelus dada. Bukankah di DPR adalah orang-orang terhormat dan terpadang yang merupakan "jelmaan rakyat" sekaligus merupakan tempat rakyat menggantungkan harapan dan asa. Namun, mengapa mereka bersikap tidak mengedepankan rasionalitas.

DPR adalah lembaga tinggi yang menjadi panutan. Seharusnya, mereka menyuguhkan cara-cara berdemokrasi. Seharusnya menjadi teladan, bagaimana cara berdebat secara sehat dan saling menghargai. Namun, yang kita saksikan adalah cara-cara berdiskusi yang tak menghargai pandangan orang lain dan memasung orang lain.

Sebagai rakyat, kita khawatir kewibawaan DPR semakin tergerus. Selama ini citra DPR dan politisi sudah berada pada tingkat yang paling rendah. Bila titik kepercayaan publik terhadap lembaga rakyat semakin terjun bebas, tentu keinginan kita membangun demokrasi yang sehat akan semakin jauh.

Dalam situasi seperti ini, kita ingat celetukan mantan Presiden (almahum) KH Abdurrahman Wahid yang menyebut DPR seperti anak TK (taman kanak-kanak). Banyak yang memprotes dan mengkritik ucapan Gus Dur itu. Tapi, kini apa yang dikatakan Gus Dur menjadi realitas. Kita telah menyaksikan pentas anak TK selama dua hari berturut-turut. (*)

GAGASAN

Tes Psikologi Anggota Dewan

SIDANG paripurna pada Selasa (2/3) ricuh. Hal tersebut sangat disesalkan karena terjadi lagi di Indonesia. Padahal, sidang itu disiarkan oleh beberapa stasiun televisi nasional secara langsung sehingga lebih banyak orang yang tahu.

Selain malu kepada bangsa sendiri, kejadian tersebut memalukan Indonesia

TES
PSIKOLOGI?

HEHEHE...
BENAR-BENAR
REFERENSI
YANG BAGUS!

SIDANG
PARIPURNA
DPR

Membaca D

O i e h

HERMANTO ROHMA

DRAMA Century tidak hanya menghilangkan gaung program seratus hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun lebih jauh lagi akan mengancam stabilitas, bahkan kemungkinan menghentikan duet pemerintahan SBY-Boediono. Kesimpulan Pansus Century, baik pandangan awal maupun pandangan akhir, masih menimbulkan skor 7 untuk kubu yang menyatakan banyak kesalahan pada kebijakan Century (minimal minus 2 yang sikapnya tidak terlalu tegas) dan poin 2 bagi kubu yang secara tegas mendukung penyelamatan bank tersebut. Parahnya lagi, kasus Century itu telah memarak-porandakan koalisi yang dibangun SBY dengan partai yang dulu berkomitmen bergabung di pemerintahan.

Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan drama itu? Apakah SBY-Boediono sebagai pemegang kekuasaan bisa keluar dari tekanan (politik) drama Century?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis teringat pada lontaran pertanyaan David Easton dalam mendefinisi-

Easton menjelaskan bahwa politik bisa berjalan secara stabil (tidak ada tekanan) jika penguasa mampu mendesain fungsi *input* (feedback) menjadi dukungan bagi sistem. Menyebutkan, ada tiga upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan dukungan bagi sistem. Yaitu, memperkuat/membangun rezim, meningkatkan kemampuan sosialisasi dan komunikasi politik, serta melakukan aksi terhadap isu.

Upaya pertama itu yang selanjutnya diterapkan Soeharto dengan rezim barunya, yang hampir semua dilakukan untuk selalu mendukung kebijakan pemerintahan meskipun bagi masyarakat. Bagi pemerintah SBY, itu akan sulit ditempuh, sangat mustahil dilakukan, iklim demokrasi sudah berbeda dalam konteks kasus Century

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan umum tentang Jawa Pos dan Jati Diri-nya:

1. Bagaimana sebetulnya makna, posisi dan peran sebuah tajuk rencana sebagai cerminan sikap media bagi Jawa Pos sendiri?
2. Kenapa nama cerminan sikap media di Jawa Pos ini dinamakan JATI DIRI, tidak seperti kebanyakan media yang memakai Tajuk Rencana, atau Editorial?
3. Bagaimana kemudian proses penerbitan sebuah Jati Diri, dari awal pembahasan hingga Jati Diri tersebut terbit?
4. Dalam menentukan tema Jati Diri, apa yang menjadi dasar, dan siapa yang berhak menentukan tema tersebut?
5. Apakah penulis Jati Diri selalu Pemimpin Redaksi?? Jika penulis Jati Diri selalu berganti/bergilir, siapa orang yang menentukan individu penulis Jati Diri?
6. Lalu, terkadang di sebelah Jati Diri, ada kartun CLEKIT, yang kadang pula bertema sama dengan apa yang dibahas di Jati Diri. Bagaimana proses penerbitan kartun ini, dari hal teknis maupun non teknis terkait penentuan tema?

Pertanyaan seputar kasus Century kepada Dewan Redaksi Jawa Pos:

1. Dari dewan redaksi sendiri, bagaimana secara umum dan khusus memandang dan menilai kasus Century dari awal muncul hingga akhirnya ‘mengambang’ saat ini?
2. Sikap apa yang sebetulnya ingin ditunjukkan Jawa Pos kepada khalayak pembacanya terkait polemik kasus Century?
3. Secara umum dan khusus, bagaimana dewan redaksi Jawa Pos menyikapi dan menilai kinerja Pansus Century selama bekerja dari mulai dibentuk hingga berujung pada Rapat Paripurna?

4. Ada isu jika pemberitaan Jawa Pos terkait Century terpengaruh dari pencalonan CEO Jawa Pos, Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN. Apakah penulisan berita dan Jati Diri Jawa Pos terpengaruh hal ini?

Pertanyaan detil seputar hasil analisis teks 7 Jati Diri:

1. Dalam Jati Diri bertajuk “Setelah Pansus Bekerja” tertanggal 23 Desember 2010, kenapa porsi pernyataan Boediono yang notabene pro terhadap kasus Century ditampilkan lebih banyak ketimbang pernyataan Burhanuddin Abdullah?
2. Seberapa besar menurut Jawa Pos dampak keterlibatan Sri Mulyani dalam kasus Century thd kehidupan perekonomian Indonesia sendiri selama kasus ini muncul?
3. Jawa Pos menilai kesimpulan sementara Pansus Century ‘kurang greget’, sebenarnya apa yang diharapkan Jawa Pos terhadap kinerja Pansus dari awal terbentuk hingga pada kesimpulan sementara yang dibuat Pansus? Apakah kinerja Pansus menurut Jawa Pos sudah maksimal?
4. Jati Diri Jawa Pos 2 kali memuat pernyataan alm. Abdurahman Wahid soal anggota DPR yang seperti anak TK. Kenapa tokoh seperti Gus Dur yang dikutip oleh Jawa Pos? Bagaimana Jawa Pos secara khusus melihat hasil sidang paripurna dan apa yang terjadi di dalamnya?

Lampiran transkrip wawancara:

Kepala Kompartemen Ekonomi Jawa Pos Abdul Rokhim.

Tanggal 22-27 September 2011 via BlackBerry Messenger.

BlackBerry Messenger,5.0.0.66

201109221316625222547,"25E7FD8E","22630742",Selamat dini hari pak kim.. :D

201109221316625246969,"25E7FD8E","22630742",Saya dany pak,temennya olen mhs atma jaya

201109221316625599416,"22630742","25E7FD8E",Malam dany, apa yg bisa aku bantu?

201109221316625738078,"25E7FD8E","22630742",Iya bgni pak,sy kbtulan prnah mngajukan riset ke jawa pos,tp d tolak..

201109221316625787072,"25E7FD8E","22630742",Ini sy sdg mncari jalan lain utk riset sy trmasuk lewat wwnrcra informal dgn orang2 dekat JP..

201109221316625838339,"25E7FD8E","22630742",Mgkn pak kim brkenan sy wwncara soal redaksional JP..bgitu pak..

201109221316625894626,"25E7FD8E","22630742",Oiya,maaf sblumnya udh ngganggu pak...

201109221316626291719,"22630742","25E7FD8E",Oke, kontak aku besok ya,

201109221316656549742,"25E7FD8E","22630742",Pagi pak kim..gmn pak?? :D

201109221316658296485,"25E7FD8E","22630742",Pagi pak kim..bgmn pak?? :D

201109221316662928372,"25E7FD8E","22630742",Siang pak kim..bgmn pak?? :D

201109221316701542644,"25E7FD8E","22630742",Selamat malam pak kim..gmn soal wwncaranya pak? :D aku ngikut waktu luangnya pak kim saja..trims pak..

201109221316701661800,"22630742","25E7FD8E",Oke ayo mulai

201109221316701703260,"25E7FD8E","22630742",Oke baik pak..

201109221316701821545,"25E7FD8E","22630742",Aku minta biodata pak kim trlebih dlu ya pak..skaligus posisi/jabatan di jawa

pos: Nama lengkap, tmpat,tgl lahir, tahun masuk jawa pos, posisi terakhir d Jawa pos..

- 201109221316702439306, "25E7FD8E", "22630742", Pak kim, klo nnt BBM nya lemot kita bs pindah k YM pak, biar ga repot jg.. klo bapak brkenan..
- 201109221316704508463, "22630742", "25E7FD8E", Gak puntya**
- 201109221316704691337, "25E7FD8E", "22630742", Oke, baik pak, via BBM aja gpp.. hehe.. silakan biadatanya pak..
- 201109231316765758717, "25E7FD8E", "22630742", Sore pak kim.. pak, smalem kyknya BBM saya yg lemot.. hehe.. smoga nnt malam bisa kita lanjutin ngobrol2nya pak.. trm ksh ya pak.. :D
- 201109231316766036245, "22630742", "25E7FD8E", Oke**
- 201109231316791840053, "25E7FD8E", "22630742", Malam pak kim.. gmn pak? bs dilanjut tny-jwb nya? :D
- 201109261317046839734, "25E7FD8E", "22630742", Halo pak kim selamat malam.. maaf baru kontak lg pak.. gmn pak kim, msh bisa wawancara??
- 201109261317047688661, "22630742", "25E7FD8E", Ayo**
- 201109261317047851533, "25E7FD8E", "22630742", Oke pak.. prtama soal tajak rencana Jawa Pos pak.. proses pnyusunan Jati Diri scr umum itu sperti apa ya pak? scr garis besar sj pak..
- 201109261317048009974, "22630742", "25E7FD8E", Tema harus aktual, apa yg jadi mainstream isu, kalo di Jp bikine gantian ada 5 redaktur sesuai bidang pol, eknmi, intern, umum, dan daerah**
- 201109261317048244607, "25E7FD8E", "22630742", Oiya pak, kadang d sebelah Jati diri itu ada kartun Clekit ya, itu menarik skali.. nah, apa kartun itu kmudian slalu saling mndukung dgn jati diri atw tema kartun bs berbeda sm skali dgn jati diri?? trus kartun itu masuk cek- ricek redaksi/tdk??
- 201109261317048494564, "22630742", "25E7FD8E", Gak terkait, clekit bebas, yg bikin malah bukan redaktur, tapi orang karikartunis yg emang nyeleneh, tetap ada pengawasan saat rapat redaktur, dari 100 hari mgkin 3 hari aja ada masukan ato kritik terkait temanya**
- 201109261317048952236, "25E7FD8E", "22630742", Gni pak kim, riset sy kn soal bgmn Jati Diri JP menilai kinerja Pansus Century.. skrg masuk k Pansus Century-nya pak..

- 201109261317049080637, "25E7FD8E", "22630742", "Jati diri tadi dibuat oleh 5 redaktur brbeda, trgantung mainstream isu.. nah klo trkhusus utk pansus century itu slm des2009-mar2010, JP menariknya century lbh k arah mana pak, apa politik apa ekonomi atw yg lain??"
- 201109261317049379818, "22630742", "25E7FD8E", "Saya ndak pernah nulis itu, teman politik yg pegang**
- 201109261317049673919, "25E7FD8E", "22630742", "Eh, pak kim tu desk ekonomi ya pak??"
- 201109261317051497973, "25E7FD8E", "22630742", "Pak kim, klo pak kim boleh mberi pnilaian.. mnurut pak kim, kbijakan bailout utk century itu tepat/tdk to pak? atw mgkn ada pndangan lain? monggo pak.."
- 201109261317052907979, "22630742", "25E7FD8E", "Aku masuk jp 2002, di jp mayoritas dukung bailout**
- 201109261317053283400, "25E7FD8E", "22630742", "Hmm gitu.. yg mayoritas ndukung itu kira2 alasannya knp pak?"
- 201109261317053671945, "22630742", "25E7FD8E", "Krisis sulit diprediksi, bailout masuk akal untuk mencegah panik, Rp 6,7 triliun tidak hilang,**
- 201109261317053886342, "25E7FD8E", "22630742", "Pantes pak dahlan iskan nulis soal simpati nya buat sri mulyani.. smpet geger jg itu tulisan pak kim.."
- 201109261317053973581, "25E7FD8E", "22630742", "Sy pikir pro nya JP k bailout jg krn pak dahlan iskan yg terang2an dukung sri mulyani pak.."
- 201109261317054219029, "25E7FD8E", "22630742", "Pak kim, tekanan pak dahlan ke redaksi JP itu besar ya pak? katananya perkataan pak dahlan itu perintah ya pak? jd ap yg dimaui pak dahlan hrs diakomodasi redaksi.."
- 201109261317054454231, "22630742", "25E7FD8E", "Gak, pak dahlan gak pernah arahkan redaksi, dia lebih sering kritik, misal terlanjut nyindir, angel gak kreatif, dsb. Jadi setelah tulisan jadi komentar, bukan sebelumnya**
- 201109261317055158793, "25E7FD8E", "22630742", "Brarti stlh pak dahlan ngritik/komen, lalu redaksi mlakukan perubahan d kmudian hari, yg jg menurut kritik/komen pak dahlan itu ya pak?"
- 201109271317057594138, "22630742", "25E7FD8E", "Yap**

201109271317058011602, "25E7FD8E", "22630742", Pak kim, sy msh ada bbrp prtanyaan, mw dtruskan skrg atw dlanjut besok lg pak? ?hehe...sy ngikut pak kim aja..

201109271317059042194, "22630742", "25E7FD8E", Lanjut aja

201109271317059127445, "25E7FD8E", "22630742", Oke pak bos

201109271317059231933, "25E7FD8E", "22630742", Td soal bailout century itu pak..kok bs dibbilang uang 6,7 triliun ga hilang pak??pdhl indikasinya banyak jg..

201109271317059300460, "25E7FD8E", "22630742", Trmasuk dugaan pnyimpangannya..

201109271317059687162, "22630742", "25E7FD8E", Saat masuk ke cash century, maka itu jadi aset, bukan menguap sperti jika dibangkrutkan. Skarang pemerinta mau menjual, ada investor mau beli 5 T, jika laku, ya 1,7 yg ilang, bayangkan kerugian jka dibiarkan bangkrut ?

201109271317060046613, "25E7FD8E", "22630742", Hmm..tp mmg krisis century itu efek dr krisis ekonomi global ya pak?soalnya byk jg pndapat,krisis century itu krn tata kelola pemilik century yg ga beres..atw mlh dua2nya?

201109271317060354096, "22630742", "25E7FD8E", Karena sala kelola, tapi terjadi saat krisis. Salah kelola, hukum bosnya, saat krisis, slamatkan banknya

201109271317060642549, "25E7FD8E", "22630742", Brarti yg d hukum harusnya bos century,bukan sri mulyani,boediono,atw kbijakan bailoutnya ya pak..

201109271317060689970, "25E7FD8E", "22630742", Kecewa jg dong JP pas pansus mmutuskan bailout bermasalah??

201109271317061100692, "22630742", "25E7FD8E", Keslahan century adlah buka produk reksadana dgn bunga gak masuk akal, itu yg harus diusut kmana fund rising itu dpake, soal pansus kita gak kecewa hasilnya, cuma para penyelmat krisis kok dperlakukan sprti tersangka

201109271317061440409, "25E7FD8E", "22630742", Tp sbtulnya pansus century itu ga perlu ada kn pak?krn klo diliat mmg murni kasus ekonomi,cm sayangnya ditarik jd sangat politis..

- 201109271317061847863,"22630742","25E7FD8E",Smangatnya bagus, duit negara gak bole dipake smbarangan, cuma sayang anggotanya bnyak gak paham eknomi, diperprah interest politik dari phak yg scara personal gak suka ama SMI
- 201109271317062095117,"25E7FD8E","22630742",Hehe..iya,malah pada ribut sndiri2..trus JP scr umum menilai kinerja pansus dr awal trbentuk-sidang paripurna gmn pak??ntu dgn brbagai drama dan khebohan di dalamnya..
- 201109271317062641308,"22630742","25E7FD8E",Pansus nihil, bahkan minus, karena mninggalkan trauma politik ke pjabat yg harusnya pro aktif jika ada potensi krisis,
- 201109271317062971200,"25E7FD8E","22630742",Iya jg ya..pjabat brikut2nya bs mikir 1000x,pdhl kbijakan hrs sgera d ambil..
- 201109271317063388798,"25E7FD8E","22630742",Pak kim,korban reksadana antaboga kn banyak jg d jatim..itu JP ga takut d cap bersebrangan po dgn mbelain bailout,krn kn smw pihak trmasuk korban,kyknya ada di posisi sbaliknya..
- 201109271317063402208,"25E7FD8E","22630742",?
- 201109271317063703972,"22630742","25E7FD8E",Di berita, kita tulis apa adanya, apalagi aksi mereka atraktif, jadi selling newsnya tinggi, shgga frekuensi tayangnya tinggi, kita main di penganggelan aja, biasanya di akhir berita ada coment pihak century
- 201109271317063941248,"25E7FD8E","22630742",Lalu lewat mana JP 'mndidik' para korban century khususnya d jawa timur yg mgkn salah kaprah brpikir soal kbijakan bailout??:idealnya kn JP mndidik jg para pmbacanya..
- 201109271317083613701,"22630742","25E7FD8E",Banyak cara, pilihan nara sumber, frame dan angel berita, pemilihan topik opini, dan diksi kata
- 201109271317084361846,"25E7FD8E","22630742",-berarti betul terasa pak,sy teliti teks Jati Diri di masa2 pansus century,JP bgitu melindungi (pembuat) kbijakan bailout,ya lewat smw cara tsb..
- 201109271317084507987,"25E7FD8E","22630742",Oiya pak,trmasuk dgn mnampilkan tulisan pak dahlan: Hati Kecil Saya Untuk Sri Mulyani, di halaman depan JP..itu ikut mnunjukkan kberpihakkan JP thd bailout..

- 201109271317084823523, "25E7FD8E", "22630742", "Eh pak kim, tulisannya pak dahlan thd SMI itu, murni simpatinya atw memang utk menuju PLN 1 to pak??soalnya sayup2 jg trdengar pak, klo itu termasuk utk mmuluskannya mnuju PLN 1..
- 201109271317084871202, "25E7FD8E", "22630742", "Biar sy dengarnya jelas, makanya sy mau tau langsung pak..hehe
- 201109271317085304989, "22630742", "25E7FD8E", "Sbetulnya pak dahlan sangat suka pak jusuf kalla, cuma dia gak suka jika orang kerja keras gak diapresiasi. Dan tulisan itu sama kali gak untuk ke dirut PLN**
- 201109271317086245136, "25E7FD8E", "22630742", "Oiya pak kim, bgmn JP mnilai tulisan pak dahlan tsb dan akhirnya mmutuskan utk mnampilkan tulisan tsb d hlm depan JP??kn sbtuhnya beresiko jg pak..
- 201109271317087356371, "22630742", "25E7FD8E", "Sperti GM di Tempo, surya paloh di MI dan jacob utama di kompas, pak dahlan juga paripurna di JP, smua tulisannya tidak diubah, dipotong, kecuali salah aja, salah ketik, dan smua tulisannya di hلمان depan, kecuali dia sndiri yg mnta di hلمان depan**
- 201109271317087898569, "25E7FD8E", "22630742", "Hmm..brarti mmg disediakan ruang utk tulisan2 pak dahlan d hlm depan JP ya pak??
- 201109271317088476926, "22630742", "25E7FD8E", "Dia pernah nulis bersambung 75 kali setiap jari di hlmn depan soal kanker hati, secara layout dan aturan halaman gak patut, tapi karena dia yg nulis kita layani, hasilnya oplah JP naik 200 ribu slama dia nulis**
- 201109271317089140400, "25E7FD8E", "22630742", "Pak kim, kberpihakan JP thd bailout century brarti jd kbijakan redaksional JP pd masa2 century itu ya pak??
- 201109271317089461070, "22630742", "25E7FD8E", "Ya, kami menyebutnya policy redaksi,**
- 201109271317090487259, "25E7FD8E", "22630742", "Klo JP mnilai SMI itu spt apa to pak?baik dia sbg pribadi maupun menkeu..mmgnya byk ya yg ga suka sm SMI termasuk orang d dlm pansus??
- 201109271317090775775, "22630742", "25E7FD8E", "SMI sedikit orang yg konsisten jadi non-partisan di kabinet, posisi itu mrrbuat dia lugas dlam menegakkan aturan, khususnya di sektor fiskal, padahal di tmpat ini banyak kasir parpol ditmpatkan**

201109271317091067479,"25E7FD8E","22630742",Klo pak boediono gmn pak kim?

201109271317092420774,"22630742","25E7FD8E",Boediono juga non-partisan, namun dia lemah dalam eksekusi, dia jago bikin konsep kebijakan, road map, masterplan, blueprint, tapi nol dalam pengawasan

201109271317094129310,"25E7FD8E","22630742",Hmm..ya ya..baik pak kim,sepertinya cukup skian apa yg mw sy tanyakan..tp skiranya k depan ada yg kurang,kita bs ngobrol2 lg ya pak??

201109271317094156701,"25E7FD8E","22630742",Sy olah dlu hsl wawancara ini..

201109271317094228068,"22630742","25E7FD8E",Oke

201109271317094495072,"25E7FD8E","22630742",Senang bs wwnra langsung dgn pak kim,pihak JP..sangat mmbantu utk riset skripsi sy..:)

201109271317094547147,"25E7FD8E","22630742",Oiya,salam utk pak baehaqi ya pak kim..

201109271317094567438,"22630742","25E7FD8E",Ok

Lampiran transkrip wawancara:

**Mahasiswa program magang di Jawa Pos, Florencia Margaretha Taruli.
Tanggal 22-23 September 2011 via BlackBerry Messenger.**

BlackBerry Messenger,5.0.0.66

201109221316622099822,"25E7FD8E","22AD98FA",eh dahlan iskan masih cawe-cawe JP ga to setelah jadi dirut PLN?

201109221316622121613,"22AD98FA","25E7FD8E",Udah nggak. Dia skrg konsen d PLN. Dirut JP skrg anaknya, si Azrul

201109221316622162583,"25E7FD8E","22AD98FA",Oo...dahlan kn mulai d PLN tahun 2010 to..makanya knp ak tertarik dgn kasus century ya jg krn tulisannya dahlan yg gambelang membela sri mulyani

201109221316622167539,"22AD98FA","25E7FD8E",Yoaiii. 2010 dia njabat d PLN tp msh berstatus Dirut JP. Kapan

persisnya dia digantikan anaknya aku ga tau

201109221316622177392,"25E7FD8E","22AD98FA",Tulisannya muncul tgl 7 des 2009 lg panas2nya pansus century..trus,mndekati pncalonannya sbg dirut pln (dia dipilih jd dirut tgl 23des2009)

201109221316622189375,"25E7FD8E","22AD98FA",Oiya,ada di laporanmu soal pemberitaan jp yg masih di order sm dahlan, klo ga salah itu berita soal pailitnya tpi...spengalamanmu d sana,sjauh mana to tekanan dahlan ke redaksi jp?

201109221316622647177,"22AD98FA","25E7FD8E",Klo dulu sewaktu dia menjabat sebagai Dirut sih, kata2nya adalah perintah.

20110922131662233795,"22AD98FA","25E7FD8E",Jadi redaktur wajib melaksanakan perintah pah Dahlan.

20110922131662235083,"22AD98FA","25E7FD8E",Karna di media2 lain ada berita ttg TPI pailit, JP aja yg kecolongan ga memberitakan TPI pailit

- 201109221316622236284, "22AD98FA", "25E7FD8E", Trus JP punya moto selalu ada yang baru, klo ga ngliput berita yg lagi hot (terkait aktualitas), yg baru apanya?
- 201109221316622247328, "22AD98FA", "25E7FD8E", Inget ttg money values yg aku tulis d laporan kkl-ku?
- 201109221316622249837, "22AD98FA", "25E7FD8E", Ga hanya news value yg diperhatikan, tp jg money values
- 201109221316622660294, "22AD98FA", "25E7FD8E", Kurang lebih begitulah
- 201109221316622737375, "25E7FD8E", "22AD98FA", Hmm..yaya..berita yg pny nilai jual gitu ya
- 201109221316622750923, "22AD98FA", "25E7FD8E", Yoai
- 201109221316622825171, "25E7FD8E", "22AD98FA", Eh waktu century itu jp bahasnya apa aja to yg spngetahuanmu?
- 201109221316622841122, "25E7FD8E", "22AD98FA", Soalnya kn tulisan dahlan iskan smpt gejer juga
- 201109221316622852082, "25E7FD8E", "22AD98FA", Tampil pula di halaman pertama jp
- 201109221316622951711, "22AD98FA", "25E7FD8E", Eh, aku salah dan
- 201109221316622964710, "22AD98FA", "25E7FD8E", Wktu aku d JP aku ga ngliput soal century bias
- 201109221316622989309, "22AD98FA", "25E7FD8E", Klo century itu dari wartawan JP jakarta
- 201109221316623025913, "22AD98FA", "25E7FD8E", itu berita ttg century kebanyakan msk ke rubrik politik kan?
- 201109221316623080982, "25E7FD8E", "22AD98FA", Menurut pngamatanku sih JP lebih narik itu k soal politik ketimbang ekonomi
- 201109221316623132394, "22AD98FA", "25E7FD8E", Ya klo gitu kamu jg harus wawancara redaktur politik jg, tp aku ga punya kontaknya
- 201109221316623153734, "22AD98FA", "25E7FD8E", Jd kamu mmg harus wawancara pak dahlan lgsg
- 201109221316623154294, "22AD98FA", "25E7FD8E", Ha ha ha

Lampiran transkrip wawancara:

Wartawan Ekonomi-Bisnis Jawa Pos, Restu Distia.

Tanggal 9 November 2011 via e-mail.

Bagaimana menurut mbak Restu secara pribadi soal kebijakan bailout pemerintah terhadap Bank Century? Apakah mbak Restu setuju dengan kebijakan itu? Kenapa?

Setuju, krn kebijakan tersebut punya alasan terhadap penyelamatan bank Century. Yang tidak berkenan, proses penyelamatan tersebut ternyata timbul masalah dengan terkuaknya kasus2.

Bagaimana penilaian mbak Restu terkait kinerja Pansus Century DPR dari mulai terbentuk sampai sidang paripurna DPR?

Sejauh ini baik, tapi mungkin terlalu lama kali ya. Memang sih, banyak anggaran yg musti dipelototin untuk mengetahui detail ke mana aliran dana tersebut.

Sepengetahuan mbak Restu, kalau awak redaksi Jawa Pos sendiri bagaimana mbak, menilai kasus Century, kebijakan bailout, dan kinerja pansus? lalu apa kebijakan redaksional JP terkait kasus Century?

Kasus century perlu diberitakan secara berimbangan dan proporsional.

Apalagi di dalam kasus tersebut melibatkan banyak pihak.

Apakah di Jawa Pos ada pro kontra tersendiri misalnya ada yang lebih berpihak pada kebijakan bailout atau sebaliknya?

Mengenai keberpihakan, itu mungkin ada. Tapi, apakah itu kemudian mencuat, saya rasa tidak.

Terus mbak, bagaimana dengan orang-orang di Jawa Pos yang misalnya kurang sepakat dengan kebijakan redaksional JP? Apa mau tak mau harus ikut dengan kebijakan tersebut?

Terus terang, saya kurang memahami pihak yang tidak sepakat. Tapi di dalam perusahaan tentu kita mengikuti semua kebijakan yg berkaitan dg keredaksian.

Mbak Restu, selama jadi wartawan di Jawa Pos, seperti apa tekanan yang biasanya di berikan redaksi JP ke wartawannya? Apakah kebijakan redaksional misal dalam kasus Century, disampaikan juga ke wartawan untuk jadi batasan-batasan dalam menulis?

Saya rasa tidak ada, sepanjang penulisan memang berdasarkan fakta2 di lapangan.

Terus model penulisan berita/tajuk rencana Jawa Pos itu seperti apa mbak? Adakah patokan tersendiri untuk wartawan menulis? Dalam menulis berita, apakah mbak Restu yang menentukan angle berita, atau sudah pesanan dari redaksi? Bagaimana prosesnya mbak?

Untuk setiap isu berita yang berkembang, redaksi membebaskan wartawannya untuk menulis dari angle manapun. Kalaupun ada perubahan angle itu jadi hak dan kewajiban redaktur sesuai tugasnya.

Mbak Restu, secara pribadi, media massa (nama) apa saja yang kerap menjadi referensi mbak Restu dalam menulis berita? Apakah berita-berita dari media lain itu turut mempengaruhi isi berita yang mbak Restu tulis?

Saya rasa tidak, krn saya membaca media lain bukan berarti sebagai referensi menulis berita. Melainkan ingin membandingkan angle yg saya pilih dari media tersebut. Krn kebijakan redaksi tiap media berbeda, terutama kalau sudah mengenali sudut pandang berita, maka media lain tdk akan berpengaruh apa apa.

PANTAUAN MEDIA MASSA DI BEBERAPA DAERAH TERKAIT AKSI DEMONSTRASI KASUS CENTURY

Des09	JABAR	JATENG/DIY	JATIM	LAINNYA
1	Detik.com - Centurygate Disorot dari Depan Gedung Sate		Detik.com - Kritisi Sikap SBY, Berbagai LSM Turun ke Jalan	Detik.com (MAKASSAR) - Demo Kasus Bank Century di Makassar Ricuh, 1 Mahasiswa Ditangkap
2				
3				
4				
5				
6	Detik.com - 700 Anggota HTI Jabar Demo Skandal Bank Century		Detik.com - HTI Minta Kasus Bank Century Diselesaikan	
7			Tempointeraktif.com - Kantor Bank Century Surabaya Dilempari Telur Busuk	
8	Detik.com - Tak Dilihat SBY, Demonstran Tetap Berorasi			Detik.com (MAKASSAR) - Jelang 9 Desember, Sejumlah Aksi Demo Terjadi di Makassar
9	Detik.com - Aksi Mahasiswa Sempat Membuat Jl Merdeka Tersendat	Detik.com - Mahasiswa Lemparkan Uang Receh ke Kantor BI Yogya	Detik.com - Nasabah Bank Century Ramaikan Demo Anti Korupsi	Detik.com (MEDAN) - Jalan Mundur Warnai Aksi Demo Anti Korupsi di Medan
10	Detik.com - Massa PMII Jabar Geruduk Gedung Sate		Detik.com - Pengunjuk Rasa Bakar Boneka, Jalan Gubernur Suryo Padat	
11				

12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21		Detik.com - Demo Century di Semarang Ricuh, Seorang Mahasiswa Diamankan		
22			Tempointeraktif.com - Tolak Kedatangan Presiden, Foto SBY- Boediono Diinjak dan Diludahi	Detik.com (PEKANBARU) - Mahasiswa Pekanbaru Tolak Kedatangan Wapres Boediono
23			Detik.com - Rumah Mantan Kepala Cabang Bank Century Dilempari Telur	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

31	Detik.com - Sebelum Aksi Century, KAMMI Jabar Heningkan Cipta untuk Gus Dur			
----	---	--	--	--

Jan10	JABAR	JATENG/DIY	JATIM	LAINNYA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11			Detik.com - Gayatri Laporkan Dugaan Penipuan Bank Century ke Polda Jatim	
12				
13			Detik.com - KAMMI Minta Pansus Bank Century Bekerja Maksimal	
14			Tempointeraktif.com - Sekitar 500-an Massa di Surabaya Tuntut Boediono-Sri Mulyani Mundur	
15	Momentum Malari Jadi Desakan Penuntasan Century			
16				

17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25	Detik.com - KM ITB Desak Pansus Century Panggil SBY			
26				Detik.com (MAKASSAR) - Belasan Mahasiswa Makassar Bakar Foto SBY-Boediono
27	Detik.com - Lembaga Dakwah Kampus Bawa Keranda Kecam Kasus Century		Detik.com - Aliansi Arek Surabaya Nilai SBY Gagal Berantas Korupsi	
28	Detik.com - Terima Rapor Merah, 'SBY-Boediono' Dipayungi 'Sri Mulyani'	Detik.com - Ratusan Mahasiswa Yogya Demo Serentak di Berbagai Tempat	Detik.com - Nasabah Century Minta Rakyat Bersatu Turunkan SBY	Detik.com (PEKANBARU) - Demo Mahasiswa di Pekanbaru Berakhir Bentrok
29				
30				
31				

Feb10	JABAR	JATENG/DIY	JATIM	LAINNYA
1		Detik.com - Demo Century di Semarang Ricuh, 2 Mahasiswa		

		Ditangkap		
2			Detik.com - Dukung SBY-Boediono, Garansi Minta Rakyat Bersatu	
3				
4		Detik.com - Dinilai Lamban, Pansus Century Dikecam Mahasiswa Yogya	VIVAnews - Puluhan 'Kerbau' Surabaya Demo Century	
5				
6				
7				
8				
9				
10			Detik.com - Pendukung SBY di Mojokerto Tolak Pansus Century	
11				
12			Metrotvnews.com - Pertemuan Pansus-BI Surabaya Diwarnai Demo Nasabah Century	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

23			Mediaindonesia.com - Nasabah Demo Duduki Bank Century	
24		Liputan6 - Demo Tuntut Penuntasan Kasus Century Marak		
25			Detik.com - KAMMI Lakukan Aksi Simpatik Desak Pansus Sebutkan Nama	
26				
27				
28				

Mar10	JABAR	JATENG/DIY	JATIM	LAINNYA
1	Detik.com - Minta Pengemplang Pajak Ditindak, Pendukung SBY Gelar Debus			
2		Pos Kota - Demo Dukung Pansus Century di Semarang	Detik.com - Mahasiswa Malang Desak Pansus Century Sebut Nama	Detik.com (MAKASSAR) - Massa Fraksi Geruduk Kantor DPRD Sulsel
3		Detik.com - Datang Naik Becak, Puluhan Orang Demo Rumah Boediono di Yogyakarta	Detik.com - Mahasiswa Anggap Pansus Century Masuk Angin	Detik.com (MAKASSAR) - Mahasiswa UMI Blokir Jl Urip Sumohardjo, Paksa Sopir Plat Merah Orasi
4			Detik.com - Hasil Paripurna Century AMDI 'Goyang' Surabaya, Minta SBY-Boediono Tetap Bekerja	
5			Detik.com - PKB Pilih	

			Opsi A, Foto Muhaimin Dibakar Kader Garda Bangsa	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14		Liputan6 - Demo Kasus Century Berakhir Ricuh		
15				
16				
17				
18			Metrotvnews.com - Mantan Nasabah Bank Century di Surabaya Kembali Demo	
19			Detik.com - Gelar Aksi, Gayatri Buat Rujak Uleg	
20				
21				
22				
23				Detik.com (MAKASSAR) - Demo Tolak Kedatangan SBY, 6 Mahasiswa Makassar Diamankan Polisi

24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Selama bulan Desember 2009 sampai dengan Maret 2010, berikut jumlah demonstrasi terkait kasus Century di berbagai daerah:

- Jawa Barat tercatat lebih kurang ada 11 demonstrasi
- Jawa Tengah dan DIY tercatat lebih kurang ada 9 demonstrasi
- Jawa Timur ada 24 demonstrasi
- Daerah lainnya ada 9 demonstrasi

21-07-2009

Nasabah Bank Century Korban Penipuan Reksadana

SURABAYA- Sudah 39 hari berkas tiga terdakwa penipuan nasabah Bank Century *ngendon* di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Namun, sampai kemarin berkas tersebut belum sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Karena itu, beberapa nasabah mempertanyakan hal tersebut dengan mengirim surat ke banyak pihak.

Mulai Presiden, KPK (Komisi pemberantasan Korupsi), Komisi Pengawas Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Pengadilan Tinggi Jatim, Pengadilan Negeri Surabaya, Kejati Jatim, dan Kejari Surabaya.

Surat tersebut berisi pertanyaan tentang sejumlah kejanggalan dalam proses hukum tiga kepala cabang Bank Century sebagai terdakwa. Mereka, Siti Aminah, Guntoro, dan Yulius. "Salah satu kejanggalan itu, berkas kepala cabang yang masih *nyantol* di Kejati. Ada apa ini," kata George Freddy, salah satu nasabah.

Seharusnya, lanjut Freddy, maksimal dalam waktu 35 hari sejak pelimpahan sudah ada kejelasan kapan perkara tersebut disidangkan. "*Lha* ini sudah 39 hari berkas di Kejati Jatim," katanya.

Pria yang tinggal di kawasan Kupang Baru itu merasa heran dengan alasan yang diberikan Kejati. "Mereka (kejati, Red.) mengatakan masih mengkaji berkas tersebut sebelum disidangkan. Padahal, berkasnya *kan* sudah matang. Sebelumnya sudah diteliti *sama* Kejaksaan karena kasus itu disidik Mabes (Polri)," paparnya.

Dia khawatir, lambannya pelimpahan kasus tersebut memang disengaja. Tujuannya, untuk memisahkan persidangan perkara dengan terdakwa Lila Komaladewi Gondokusumo. Apalagi, dia mendengar isu bahwa Lila nantinya bakal dibebaskan. Sebagai korbannya, tiga kepala cabang yang disidangkan belakangan.

"Lila terkesan mau melemparkan tanggung jawab pada bawahannya. Dia mau cuci tangan," ucap Freddy. Hal itu terlihat dari berkas berita acara pemeriksaan (BAP) milik Lila yang bersumber dari Bareskrim Mabes Polri.

Dalam BAP poin 56 disebutkan bahwa Lila sempat menanyakan kepada Gantoro, yang saat itu menjabat sebagai kepala Cabang Kertajaya, tentang besaran *fee* yang didapat untuk penjualan produk investasi reksadana.

Pertanyaan tersebut, menurut Freddy, janggal karena sebenarnya Lila yang memerintahkan kepada para kepala cabang untuk menjual produk investasi tersebut melalui internal memo yang dibuatnya. "*Mosok* atasan tanya ke bawahan berapa *fee*-nya, *kan* kebalik," ujarnya.

Termasuk, keterangan Lila bahwa setiap nasabah mengisi formulir aplikasi investasi sebelum memindahkan dananya ke PT Antaboga Delta Sekuritas. Freddy menegaskan, banyak nasabah yang tidak tahu menahu bahwa dananya yang tersimpan di Bank Century ditransfer ke program reksadana tersebut.

Karena itulah, dia meminta agar perkara tersebut diawasi agar nasabah memperoleh keadilan yang sebenarnya. "Ini kasus nasional, jangan sampai dimainkan oleh oknum-oknum tertentu," tegasnya.

Kejanggalan yang diungkapkan Freddy itu juga membuat resah ketiga kepala cabang tersebut. "Masak, Bu Lila seperti ini," kata Siti Aminah setelah menerima salinan BAP tersebut dari Freddy. Pria kulit putih itu memang menjenguk ketiga tahanan tersebut di Rutan Medaeng kemarin.

Wajah Aminah, Guntoro, dan Yulius tampak kaget membaca BAP tersebut. Aminah yang tetap modis meski tinggal di dalam rutan itu mengatakan, semua produk yang dijual di Bank Century atas perintah Lila. Karena itu, tidak mungkin Lila tidak tahu tentang *fee* yang diterima untuk setiap penjualan produk reksadana.

Jika nanti atasannya itu bebas, sementara mereka bertiga dinyatakan bersalah, Aminah yakin ada indikasi suap menyuap. "Bagaimana tidak, saya hanya bawahan yang menjalankan perintah atasan," kata Mimin, panggilan Siti Aminah.

Gantoro dan Yulius membenarkan hal tersebut. Keduanya mengatakan, ada internal memo dan surat edaran

yang menjadi bukti bahwa penjualan reksadana itu atas perintah Lila. Tanpa surat itu, mereka mengaku tidak berani menjualnya.

"Nyambi kerja apa *gitu* saja dipermasalahan. Apalagi, kalau sampai jual produk tanpa sepengetahuan atasan," ucapnya. Mereka akan membeber bukti bahwa Lila menerima *fee*. Sebab, mereka membagi *fee fifty-fifty* dengan Lila setiap ada penjualan reksadana.

Sementara itu, Kasi Penkum (penerangan hokum) Kejati Jatim Muljono mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan para nasabah tersebut. Masukan itu akan disampaikan ke pimpinan sesegera mungkin. "Besok (hari ini, Red.) juga saya teruskan," tegasnya.

Dia menambahkan, sebenarnya berkas perkara ketiga terdakwa itu tidak ada masalah dan dipastikan akan lancar. Hanya, dia mengaku kurang tahu persis dengan kasus itu. Alasannya, perkara tersebut ditangani oleh Asisten Pidana Umum (Aspidum). (eko/cfu)

Jawa Pos

ARSIP

04-09-2009

Nasabah Lempari Bank Century dengan Tomat dan Telur Busuk

SURABAYA - Nasabah Bank Century, Surabaya, kembali berunjuk rasa. Mereka menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak objektif. Yakni, dinilai hanya menguntungkan nasabah kelas kakap. Sementara nasabah kecil dikesampingkan.

Demo yang dimulai pukul 10.00 tersebut dilakukan di depan Bank Century, Jalan Kertajaya. Mereka membawa berbagai poster berisi hujatan kepada manajemen Bank Century, pemerintah, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tidak cukup dengan berorasi di depan bank, demonstran yang dipimpin Sri Gayatri itu juga melempari kantor Bank Century dengan lusinan tomat dan telur busuk. Tak ayal, aksi itu mendapat perhatian para pengguna jalan yang melintas di Jalan Kertajaya.

Akibat aksi tersebut, kantor bank yang mendapatkan suntikan dana Rp 6,7 triliun dari pemerintah itu kotor dan berbau busuk. Bahkan, petugas sekuriti bank harus menutup hidung. "Bank Century, kembalikan uang kami!" teriak Sri Gayatri, disambut sorak sorai belasan demonstran yang lain.

Aksi demo yang berjalan sekitar 45 menit itu menuntut klarifikasi terkait suntikan dana Rp 6,7 triliun oleh pemerintah ke bank tersebut. Mereka menganggap dana sebesar itu terlalu fantastis untuk menolong bank yang telah menggelapkan uang nasabah hingga Rp 2,4 triliun.

"Manajemen Bank Century yang sekarang lebih parah karena menipu semua pihak, termasuk rakyat, kepolisian, dan presiden," tandas Edo Abdul Rahman, koordinator aksi.

Dia juga mempertanyakan sikap LPS dan menteri keuangan yang hanya menggelontorkan dana untuk nasabah kelas kakap. Mereka kecewa dan merasa dianggap sebagai anak tiri dan digolongkan nasabah fiktif.

"Kalau mereka punya nyali, kami undang ke Surabaya. Kalau mereka benar, kami siap uang kami tidak dibayar," tegas Edo, yang mengaku kehilangan Rp 13 miliar itu.

Para pengunjuk rasa tersebut adalah korban reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas (ADS) yang melibatkan pejabat Bank Century. LPS yang mengambil alih Bank Century, rupanya, tidak bersedia mengembalikan uang para nasabah yang "hanyut" di reksadana tersebut. "Ketika kami meminta hak kami, mereka mengatakan hanya penjamin saja," ujar Edo.

Dalam aksinya, Edo juga mengutuk berbagai upaya yang dilakukan Bank Century untuk memecah belah suara nasabah Surabaya. Misalnya, menawarkan iming-iming pengembalian uang asal tidak vokal. "Kami di sini mencari penyelesaian yang resmi. Bukan dengan cara diam-diam dan tidak *gentle*," jelas pria berusia 32 tahun

itu.

Dia menambahkan, nasabah akan terus melakukan berbagai aksi menuntut dikembalikannya uang mereka. Salah satu di antaranya dengan terus merongrong beroperasinya kembali Bank Century di Surabaya. "Terseher mau buka di mana, asal tidak di sini. Sebab, mereka telah melakukan dosa besar kepada warga Surabaya," tambah nasabah Bank Century sejak 2005 itu.

Sementara itu, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kepala Korwil V Bank Century Lila Komaladewi Gondokusumo kemarin saling bantah dengan anak buahnya, Siti Aminah (kepala Bank century Cabang Kertajaya). Lila bersikukuh tidak terlibat dalam kasus raibnya dana nasabah yang tertanam di produk reksadana Antaboga.

Lila kemarin dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Kepala Bank Century Cabang Kertajaya Siti Aminah. Itu merupakan pertemuan kedua di ruang sidang sejak keduanya terseret kasus yang sama.

Dalam sidang tersebut, Lila menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam aktivitas pemasaran produk reksadana milik PT ADS. Dia beralasan, kegiatan itu dilaksanakan sendiri-sendiri oleh kepala cabang.

Sebagai kepala Korwil V Bank Century, kata dia, dirinya hanya mengurus produk bank tempatnya bekerja, seperti tabungan, deposito, dan giro. "Saya hanya memerintah kepala cabang untuk mencapai target itu," ujarnya.

Ibu satu anak itu menceritakan, pada awal 2005 muncul surat edaran kerja sama dari Bank Century pusat dengan PT ADS. Isinya, memerintahkan agar menjual produk reksadana. Turunnya surat edaran itu juga ditindaklanjuti dengan penyebaran brosur.

"Waktu itu, saya dihubungi Pak Robert Tantular (pemilik Bank Century, Red) untuk memastikan penjualan produk reksadana itu," terangnya. Selanjutnya, dia menyampaikan hal tersebut kepada Siti Aminah dan Gantoro (kepala Cabang Bank Century Jalan Rajawali).

Lila menegaskan, dirinya tidak *cawe-cawe* dalam pemasaran produk itu. Sebab, kepala cabang langsung berhubungan dengan PT ADS. Selain itu, tidak ada kewajiban bagi kepala cabang untuk melaporkan hasil penjualan reksadana kepada kepala korwil. Perempuan yang juga menjabat direktur marketing Bank Century itu menambahkan, dirinya juga tidak pernah mengadakan rapat untuk membahas soal produk reksadana.

Keterangan Lila itu dibantah Siti Aminah. Menurut Siti, sejak 2005, pengendalian penjualan produk reksadana di Surabaya dipegang sepenuhnya oleh Lila. "Dia sering melakukan rapat dan pertemuan serta mengirim faks ke kepala cabang untuk mengecek penjualan reksadana," kata Siti.

Menurut dia, dalam beberapa kesempatan, Lila memberikan pengarahan kepada kepala cabang tentang bagaimana cara memasarkan produk reksadana tersebut. (dim/eko/tom)



09-09-2009

Tuntuan Terhadap Lila Gondokusumo Tak Memuaskan Nasabah Century

SIDANG tuntutan terhadap Lila Komaladewi Gondokusumo di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (7/9), tak memuaskan nasabah Bank Century. Mereka menganggap tuntutan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap terdakwa penipuan itu separo hati

Sudiman Sidabukke, kuasa hukum George Freddy, salah seorang nasabah Bank Century, angkat suara. Menurut dia, jaksa ambigu dalam menentukan sikap seperti yang tertuang dalam surat tuntutan.

Sudiman menjelaskan, jika memang menganggap Lila terbukti bersalah bertindak pidana menipu, seharusnya jaksa menuntut hukuman maksimal, yaitu empat tahun penjara. Namun, jaksa malah menuntut hukuman 3,5 tahun. "Jaksa tampaknya tidak maksimal," katanya.

Demikian pula sebaliknya. Jika memang tidak terbukti, hendaknya dibebaskan. Sikap itu, menurut Sudiman, tidak mendidik penegakan hukum di Surabaya. Sebab, di satu sisi membenarkan adanya tindak pidana, tapi di sisi lain bersikap sebaliknya.

Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Darmo tersebut juga menanyakan soal jerat tindak pidana pencucian uang. Dalam surat tuntutan kemarin, jaksa sama sekali tidak menyinggung soal tindak pidana tersebut. "Padahal, waktu pembacaan dakwaan, jaksa seperti yakin bahwa ada tindak pidana pencucian uang," ucapnya.

Menurut dia, sebenarnya jaksa sudah bisa melihat apakah suatu tindak pidana akan terbukti atau tidak saat menerima pelimpahan. Biasanya, jika unsur tindak pidananya lemah, jaksa mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi.

Dalam perkara Lila, jaksa seolah-olah yakin ada tindak pidana tersebut. Tapi, saat pembacaan tuntutan, jaksa malah memutus sendiri bahwa hal itu tidak terbukti. "Saya tidak melihat jaksa berusaha membuktikan jerat pasal *money laundering*," tuturnya.

Untuk mengembalikan kerugian materiil nasabah, dia sudah mengajukan gugatan. Tergugatnya, antara lain, Bank Century dan Lila. Saat ini, prosesnya masih pembuktian.

Sementara itu, Lila kemarin mulai berani berkomentar soal tuntutan. Menurut dia, tuduhan jaksa tidak benar. Dia menjelaskan, program reksadana ada sejak dirinya belum masuk ke Bank Century. Reksadana muncul pada 2002 waktu bank tersebut masih bernama CIC.

Lila menambahkan, dirinya baru masuk ke bank tersebut pada Juni 2005. Dia menduduki kursi kepala Korwil V Surabaya-Bali. Dia merangkap *marketing director* pada 2007. "Saya tidak terlibat sama sekali dalam penyusunan produk investasi itu," tegasnya.

Karena sudah ada sejak lama itulah, Lila tidak berwenang mengubah atau menghapus program penjualan produk investasi berbentuk reksadana yang sudah ada. Meski, saat itu dia sudah menduduki salah satu jabatan direksi.

Ibu satu anak tersebut juga membantah telah mengadakan pertemuan dengan para kepala cabang untuk berkoordinasi masalah penjualan reksadana. Sebagai kepala Korwil V Surabaya-Bali, dirinya hanya bertugas mengawasi pencapaian target tabungan, giro, dan deposito.

"Tapi, ada yang berusaha memalsukan tanda tangan saya di sebuah hasil notulen *meeting*, seolah-olah saya setuju," ucapnya.

Hasil rapat itu lantas disebar ke beberapa kepala cabang seolah-olah rapat tersebut membahas tentang reksadana. Lila akan memberikan pembelaan lebih lengkap dalam sidang selanjutnya dengan agenda pembelaan.

Sebagaimana diberitakan, jaksa Raimel Jesaya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menuntut Lila hukuman 3,5 tahun penjara. Lila dianggap terbukti bersalah karena telah menipu dengan menawarkan produk investasi dengan bunga yang tidak wajar. (eko/dos)



Gayatri Kunjungi Pantli

SIDOARJO - Sri Gayatri, nasabah eks Bank Century, yang pernah memunculkan kontroversi, berkunjung ke Pantli Asuhan Bukti Luhur kemarin (25/11). Perempuan yang menyatakan uangnya raib Rp 69 miliar itu menyumbang pantli tersebut.

Gayatri menitikkan air mata saat menggendong bocah berkebutuhan khusus di tempat itu. Sekitar pukul 10.00, Gayatri bersama rombongan tiba di pantli yang berlokasi di Wisma Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, tersebut.

Begitu sampai, dia menyerahkan bantuan bahan makanan dan peralatan untuk anak-anak. Selanjutnya, Gayatri berkeliling untuk menjenguk penghuni panti tersebut.

Panti itu dihuni sekitar 90 orang lanjut usia serta anak yatim dan anak berkebutuhan khusus. Gayatri mengunjungi mereka dari satu tempat ke tempat lain.

Di salah satu ruang, Gayatri bertahan lama. Dia menggendong bocah yang menderita *hydrocephalus*. "Saya tidak membayangkan jika itu terjadi kepada saya," ungkap dia.

Gayatri mengatakan, berkunjung ke panti adalah kebiasaan rutinnnya. Hanya, kebiasaan itu terganggu karena kasus Bank Century. "Kegiatan berkunjung ke panti tidak bisa berjalan lancar," ucap dia.

Untung, saat ini aktivitasnya mulai kembali seperti semula. Dia juga berkunjung lagi ke tempat sosial. Dia berharap kasus Bank Century segera selesai sehingga uangnya kembali. "Dengan begitu, sya bisa lebih sering berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung," tegas dia. (riq/ib)

Jawa Pos

ARSIP

09-12-2009

PN Surabaya Menangkan Gugatan Dua Nasabah Bank Century

SURABAYA - Para nasabah PT Bank Century akhirnya bisa bernapas lega. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kemarin memenangkan gugatan dua nasabah, George Freddy dan George Maria Veronica, terhadap manajemen Bank Century dan PT Antaboga Deltasekuritas atas kelalaian mengelola dana simpanan nasabah. Dalam gugatan senilai Rp 8,4 miliar itu, Bank Century menjadi tergugat I dan PT Antaboga sebagai tergugat II.

Majelis hakim menyatakan, para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi atas sejumlah dana milik penggugat. Para tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian dana investasi atas pengelolaan dana (*discretionary fund*) milik Freddy senilai Rp 7,2 miliar.

"Para tergugat juga diwajibkan membayar kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh Freddy apabila dana investasi di PT Antaboga tersebut bisa dimanfaatkan Freddy," kata Barlin Damanik, ketua majelis hakim, dalam persidangan kemarin.

Majelis mematok persentase imbal balik 2,5 persen per bulan dari dana simpanan. Itu dihitung satu bulan sejak 19 November 2008 (estimasi tanggal jatuh tempo) hingga gugatan diajukan pada Desember 2008. Dengan demikian, nilai keuntungan yang hilang Rp 180 juta. "Nilai tersebut bertambah terus sampai eksekusi putusan," terang Barlin.

Majelis hakim juga mengeluarkan penetapan adanya tindakan penyitaan terhadap aset para tergugat. Mulai penggugat I hingga XI. Aset sitaan itu, antara lain, rumah dan tanah milik Lila Gondokusumo (tergugat VI) di Jalan Kusuma Bangsa 27 Surabaya, Jalan Untung Suropati 3 Surabaya, Jalan Dr Sutomo 37 Surabaya, tiga apartemen di Bellagio Residences, Jakarta, dan tiga vila di Taman Mumbul, Nusa Dua, Bali.

Menurut Sudiman Sidabukke, pengacara Freddy dan George Maria, putusan tersebut menjadi kabar baik bagi seluruh nasabah bank yang kini berganti nama Bank Mutiara itu.

Sudiman mengatakan, perkara George Maria yang disidang secara terpisah juga dijatuhi putusan serupa. Majelis yang diketuai Nielson Pasaribu menyatakan, para tergugat bersalah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta wanprestasi. Para tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi berupa

pengembalian dana investasi (*discretionary fund*) milik Maria di PT Antaboga sebesar Rp 400 juta. "Mereka juga diwajibkan membayar kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat sebesar Rp 10 juta yang akan bertambah terus sampai dengan eksekusi," ungkapnya.

Majelis hakim, lanjut Sudiman, juga mewajibkan tergugat membayar kerugian materiil penggugat untuk biaya sewa pengacara Rp 100 juta. "Majelis juga memerintahkan penyitaan semua aset milik tergugat."

Gugatan kasus tersebut bermula saat Freddy dan George Maria menanam deposito di Century. Manajemen Century lantas mengiming-iming dengan imbal hasil 12 persen -yang di atas rata-rata bunga deposito- apabila Freddy dan George Maria mengalihkan deposito ke produk *discretionary fund* di PT Antaboga. Keduanya ternyata tertarik. Freddy dan George Maria lantas menginvestasikan masing-masing Rp 8 miliar dan Rp 700 juta ke PT Antaboga.

Saat kasus Bank Century mencuat, Freddy dan George Maria berusaha mencairkan, namun gagal. Pada 21 November 2008, Freddy hanya menerima pencairan Rp 800 juta. Sedangkan George Maria menerima Rp 300 juta.

Sesuai dengan isi gugatan Freddy dan George Maria, manajemen Century dan PT Antaboga menjadi tergugat I dan XI. Tergugat lain adalah Hermanus H. Muslim (tergugat II), Hamidy (III), Khrisna Jagateesan (IV), Edward Mandahar (V), Lila Gondokusumo (VI), Sulaiman Ahmad Basyir (VII), Hesham Alwarraq (VIII), Poerwanto Kamsjadi (IX), dan Rusli Prakarsa (X). (**may/agsm**)



12-01-2010

Lapor ke Polres dan Polda

SRI Gaya Tri tiba-tiba muncul di Polda Jatim. Kali ini perempuan yang aktif melakukan unjuk rasa terhadap Bank Century itu tidak bikin heboh. Dia datang untuk melaporkan dugaan pemalsuan yang dilakukan manajemen Bank Century.

Ditemui di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian, Gaya Tri menyatakan tidak terima dengan pindahnya uangnya Rp 2,8 miliar dari deposito ke reksa dana PT Antaboga Delta Sekuritas. "Padahal saya tidak pernah mendapatkan surat untuk menyetujui perpindahan uang saya tersebut. Apalagi tanda tangan," katanya.

Beberapa hari sebelumnya, Gaya Tri melaporkan kasus yang sama ke Polres Surabaya Timur. Namun karena merasa kasus ini berskala nasional, dia kembali melapor ke Polda Jatim. "Saya memang tidak tahu siapa yang memalsu tanda tangan saya itu. Yang jelas ini sangat merugikan saya," tambahnya.

Dia mengaku sangat kecewa lantaran uang itu sangat tinggi nilainya dan sangat berharga. "Uang saya itu sebagian juga uang anak-anak panti asuhan," ujarnya. (**kuh/tom**)



26-02-2010

KAMMI Minta KPK Proaktif

SURABAYA - Para mahasiswa masih geram melihat panitia khusus (Pansus) DPR tentang bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century belum mengambil sikap kongkret. Kemarin (25/2), belasan mahasiswa yang tergabung

dalam Kesatuan aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Surabaya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya.

Para mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan kepada pansus untuk menuntaskan kasus yang mencoreng Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya itu. Ketua KAMMI Daerah Surabaya Agus Kusdiyanto mengatakan pihaknya menuntut rapat paripurna DPR yang membahas kesimpulan Pansus bisa menghasilkan keputusan kongkret.

"Kami mendesak agar saat paripurna nanti Pansus menyebutkan nama orang yang paling bertanggung jawab atas kasus Century," kata Agus Kusdiyanto.

Selain itu, KAMMI meminta komisi pemberantasan korupsi (KPK) proaktif mengambil alih kasus century dan menindak tegas siapa yang bertanggungjawan atas bailout century. **(lum/tom)**



